

e-news letter

AGUSTUS IV 2020

PKS PARLEMEN

KREATIF SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. Hermanto, S.E., M.M

Fraksi PKS Kritik

Target Pendapatan dan
Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah



Kemarau Kepemimpinan, Ditengah Krisis Panjang

Otoritas selama ini jangankan bicara puncak gelombang pandemic, mendefinisikan titik puncak saja tidak pernah ada kabar beritanya. Diraba-raba dan dirasa-rasa, tidak berdasarkan data. Masalah dan solusi ditumpuk dalam satu wadah, bukan sebagai proses berpikir yang runut, bertindak yang tepat dan evaluasi berkala.

Saat ini kita menghadapi situasi yang tidak biasa, pun semua sadar dan tahu. Dalam mengarungi bencana beragam cara ditempuh, karena ini adalah sesuatu yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Dalam mengambil kebijakan ada yang sangat konservatif dengan pendekatan ilmiah (*scientific based*), namun sedikit lain ada yang melalui dengan meraba-raba dan mencoba-coba bahkan menanggalkan rasionalitas.

Situasi krisis saat ini bukan lagi persoalan medis, tapi telah merangsek menjadi masalah ekonomi. Kebijakan

yang parsial dan 'gado-gado' hanya akan melahirkan keruwetan baru ditengah krisis yang menerpa. Otoritas selama ini jangankan bicara puncak gelombang pandemic, mendefinisikan titik puncak saja tidak pernah ada kabar beritanya. Diraba-raba dan dirasa-rasa, tidak berdasarkan data. Masalah dan solusi ditumpuk dalam satu wadah, bukan sebagai proses berpikir yang runut, bertindak yang tepat dan evaluasi berkala.

Kebijakan terlihat seperti menggugurkan kewajiban dan prasyarat administratif. Namun implementasi jauh

panggung daripada api. Maka jangan berharap ikhtiar menyesuaikan proses. Justru yang nampak fenomena anomaly bermunculan dan berkelindan ditengah public. Kita memilih jalan yang riuh ditengah sejumlah negara mengambil jalan sepi yang terbukti efektif menekan angka kematian.

Kita sejak awal memilih berjalan beriringan bersama wabah, akibatnya angka paparan covid 19 melonjak mengikuti pola kebijakan tersebut. Sikap optimis dan pandangan yang realistis penting dalam mengayuh kebijakan di masa krisis, bukan sekedar kepercayaan diri yang berlebihan (*over confidence*) hingga pada akhirnya melebihi perkiraan (*over estimate*)

Atas dasar kesadaran tersebut dalam menghadapi krisis berkepanjangan ini dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, visioner dan penetratif. Wabah Covid 19 mungkin hanya sedikit cara untuk memahami karakter kuat kepemimpinan yang sesungguhnya. Bagaimana pemimpin dapat mempersiapkan dan membimbing melalui bencana



besar. Apakah dia berkerja untuk melewati krisis ataupun hanya menyiapkan panggung untuk krisis berkelanjutan atau bahkan permanen.

Untuk mendistribusikan tanggung jawab kepemimpinan secara lebih luas, perlu kemampuan memobilisasi semua orang untuk menghasilkan solusi dengan meningkatkan arus informasi yang memungkinkan setiap orang untuk membuat

keputusan independen dan berbagi cerita baik dari apa yang mereka pelajari. Ironisnya pendulum berjalan kea rah sebaliknya, Justru pemegang otoritas mengalihkan informasi ke satu sudut ruangan berbentuk 'kharisma virtual' para influencer, untuk kemudian membingkai pesan dalam narasi yang sempit dan sepihak.

Humas Fraksi PKS DPR RI



Fraksi PKS Kritik Target Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah

Pastikan anggaran diarahkan untuk meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan rakyat guna penanggulangan risiko krisis kesehatan akibat covid-19 dan pemulihan ekonomi

Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Badan Anggaran DPR RI

Jakarta (25/8) Fraksi PKS DPR RI menyoroti Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 yang disampaikan oleh pemerintah pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Selasa (25/8). Menurut Fraksi PKS, target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang mencapai sekitar 4,5-5,5 persen kurang realistis.

"Hal ini karena dalam kondisi normal saja, pertumbuhan ekonomi gagal dicapai. Perlu ada kajian lebih mendalam sehingga target pertumbuhan ini lebih kredibel, konsisten dan dapat menjadi acuan bersama ke depan" ujar Hermanto, Anggota Banggar DPR RI yang mewakili Fraksi PKS DPR RI.

Selain itu, menurut Hermanto, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pertumbuhan

ekonomi yang lebih baik. Pada triwulan ii-2020, ekonomi Indonesia turun hingga 5,32%. Angka kemiskinan naik menjadi 26,42 juta orang pada Maret 2020; naik 1,63 juta dalam enam bulan. Jika dibandingkan dengan data tahun lalu, jumlah penduduk miskin naik 1,28 juta orang. Jumlah pengangguran diprediksi melonjak menjadi 8,1-9,2%

Untuk meringankan beban rakyat, Fraksi PKS mengusulkan agar pemerintah mengurangi sejumlah pajak. Salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor, Beban Balik Nama Kendaraan Bermotor Dua, dan biaya pungutan STNK. Selain itu, diharapkan agar Surat Izin Memuduri (SIM) diberlakukan semur hidup untuk mengurangi beban

waktu/tenaga masyarakat.

"Ini perlu dilakukan agar masyarakat miskin dan rentan yang umumnya menggunakan kendaraan bermotor roda dua tidak terbebani setiap tahunnya. Khusus untuk pajak kendaraan bermotor, pendapatan daerah yang berkurang dapat ditambah dengan bagi hasil pemerintah pusat ke daerah" ujar Hermanto.

Daya beli masyarakat yang rendah juga dapat diatasi dengan menghapus pajak penghasilan (PPH) untuk wajib pajak berpenghasilan di bawah 8 juta per bulan. Hal ini karena Fraksi PKS melihat kenaikan PTKP yang belum cukup mendingkrak daya beli masyarakat, serta besarnya jumlah kaum muda berpenghasilan menengah ke bawah yang rentan jatuh ke jurang kemiskinan, sehingga dibutuhkan stimulus fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Daya beli masyarakat diharapkan dapat meningkat signifikan dengan menghapus PPH tersebut" ujar Hermanto.

Fraksi PKS juga menyoroti target pendapatan yang dipatok tumbuh 4,3% dari target 2020,



sedangkan penerimaan perpajakan dipatok tumbuh 5,8%.

Target-target tersebut perlu dikaji lebih lanjut terutama adanya potensi terjadinya shortfall perpajakan yang perlu diantisipasi semenjak awal.

"Pemerintah harus menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lambat akibat wabah Covid-19, deindustrialisasi dini dan ketidakpastian perekonomian global. Kami menilai realisasi pendapatan negara yang hanya sebesar 90,6% dari target pada tahun 2019, dan realisasi per Juni 2020 yang hanya 47,7% sangat jauh dari harapan dan

perlu menjadi peringatan dini Pemerintah." kata Hermanto.

Di sisi lain, alokasi anggaran juga harus lebih progresif. Fraksi PKS mencatat pada RAPBN 2021 bahwa belanja Pemerintah Pusat masih didominasi oleh Pembayaran Bunga Utang Rp373,3 triliun, Belanja Barang Rp357,4 triliun, setelah Belanja Modal Rp250,3 triliun.

"Pastikan anggaran diarahkan untuk meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan rakyat guna penanggulangan risiko krisis kesehatan akibat covid-19 dan pemulihan ekonomi" ujar Hermanto..

Pertumbuhan Ekonomi Negatif

Aleg PKS: Pemerintah Harus Optimalkan Kebijakan Pemulihan Ekonomi

“Saat ini, daya beli masyarakat menurun. Pemerintah harus mampu untuk mendorong konsumsi rumah tangga sehingga masyarakat melakukan spending. Hal ini akan memberi efek positif bagi terserapnya produk dalam negeri”

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (26/8) – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, memberikan sejumlah kritik dan masukan kepada pemerintah yang belum optimal dalam menjalankan kebijakan pemulihan ekonomi. Hal ini menyusul keterangan Menkeu tentang kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kembali minus di kuartal ketiga.

“Pemerintah harus melakukan optimalisasi ekonomi dalam negeri, sehingga bisa menciptakan

ekonomi yang berkeadilan”, kata Anis Byarwati dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/8/2020).

Ia menyoroti penyerapan anggaran dalam program stimulus untuk ekonomi rakyat yang masih seret. Ini terlihat dari realisasi anggaran perlindungan sosial yang baru sebesar 38 persen dari alokasi Rp203,9 triliun; realisasi anggaran UMKM baru terlaksana 25 persen dari alokasi Rp123,46 triliun; dan realisasi anggaran kesehatan

baru terealisasi 7,22 persen dari alokasi Rp87,55 triliun.

Kondisi ini tentu berdampak buruk bagi perputaran ekonomi negara. Mengingat, salah satu kunci utama untuk mengerek kinerja perekonomian pada kuartal III adalah konsumsi domestik.

“Saat ini, daya beli masyarakat menurun. Pemerintah harus mampu untuk mendorong konsumsi rumah tangga sehingga masyarakat melakukan spending. Hal ini akan memberi efek positif bagi terserapnya produk dalam negeri”, ucap dia.

Hal yang sama terjadi di sektor usaha, korporasi, dan investasi. Penyerapan anggaran untuk insentif dunia usaha baru mencapai 13 persen dari alokasi Rp120,61 triliun. Sedangkan, program pembiayaan korporasi belum terealisasi dalam anggaran Rp53,57 triliun. Padahal, menurut Anis, pemerintah perlu mendorong efektivitas industri



manufaktur. Mengingat, sektor manufaktur mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Anis pun menilai, belanja-belanja pemerintah belum maksimal. Hal ini nampak dari realisasi anggaran sektor K/L dan pemda yang baru mencapai 6,5 persen dari alokasi Rp106,11 triliun. Padahal, di saat tingkat konsumsi sedang turun dan investasi rendah, seharusnya belanja pemerintah bisa dioptimalkan sebaik mungkin untuk membantu

pemulihan ekonomi nasional. “Ketika belanja pemerintah tidak bisa optimal, ini akan membawa Indonesia ke jurang resesi di kuartal III”, ujar dia.

“Saya juga mengingatkan kepada pemerintah untuk fokus pada pencapaian target-target ekonomi dan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, sebagai upaya menghindari kegagalan yang sama pada RPJMN 2015-2019. Terlebih di tengah krisis pandemi Covid-19, rakyat membutuhkan kerja keras pemerintah”, tutup Anis.

Pembelian Bulk Vaksin COVID-19

DPR: Perkuat Bukti Indonesia Tak Berdaulat dalam Kefarmasian

Menteri BUMN, Erick Thohir ketika awal Covid-19 melanda mengakui Indonesia 90% industri kesehatan dari impor, kemudian menyatakan ada mafia dan menyatakan akan melawan. Namun, kini Pak menteri sepertinya menelan ludah sendiri dengan memimpin impor bahan baku vaksin Covid-19

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (28/08) — Pemerintah Indonesia melalui Menteri BUMN dan Menteri Luar Negeri melakukan perjanjian Preliminary Agreement of Purchase and Supply of Bulk Production of Covid -19 Vaccine.

Perjanjian pembelian bulk vaccine dengan Sinovac China menunjukkan bukti bahwa Indonesia tidak berdaulat di bidang farmasi. Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI dari

Fraksi PKS, Sukamta.

"Presiden Jokowi dengan bangga menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara yang paling siap menyediakan vaksin COVID-19 setelah perjanjian bulk vaksin dengan perusahaan farmasi Sinovac, China. Namun, seharusnya disisi lain bapak presiden sedih. Perjanjian ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak berdaulat dalam bidang farmasi," jelas Doktor lulusan

Inggris ini.

Sukamta kemudian memberikan dua alasan mengapa Indonesia disebut tidak berdaulat dalam bidang farmasi.

"Pertama, alokasi yang besar diberikan oleh perusahaan produsen vaksin karena perusahaan dan negara produsen vaksin melihat potensi bisnis yang menguntungkan dengan Indonesia sehingga diprioritaskan. Indonesia membutuhkan sekitar 350 juta dosis Vaksin Covid 19 dengan anggaran sebesar Rp 25 triliun hingga Rp 30 triliun," urainya.

"Kedua, Indonesia sampai saat ini mengimpor 95 persen dari total kebutuhan industri dalam negeri. Impor dari China adalah yang terbesar, mencapai 60 persen," imbuhnya.

Dalam masalah bahan baku industri kesehatan, Sukamta kemudian menyoroti mengenai inkonsistensi antara kebijakan dengan statement yang dikeluarkan. Legislator asal Jogja ini



kemudian menyentil Menteri BUMN, Erick Thohir.

"Menteri BUMN, Erick Thohir ketika awal COVID-19 melanda mengakui Indonesia 90% industri kesehatan dari impor, kemudian menyatakan ada mafia dan menyatakan akan melawan. Namun, kini Pak menteri sepertinya menelan ludah sendiri dengan memimpin impor bahan baku vaksin Covid-19," tandasnya.

"Padahal jika kita serius kita bisa membuat bahan baku bulk vaksin memanfaatkan pemanfaatan bahan baku yang berasal dari sumber daya alam Indonesia," tegas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

Sukamta kemudian menambahkan, potensi bisnis vaksin ini luar biasa seharusnya jadi

momentum Indonesia untuk mandiri dari mengembangkan bisnis vaksin.

"Bio Farma sebagai Perusahaan farmasi milik negara PT Bio Farma (Persero) dengan kapasitas produksi pemerintah 3 miliar dosis terbesar di Asia Tenggara bahkan 132 negara telah mengimpor vaksin dari Indonesia. Ini potensi besar. Maka seharusnya pemerintah mengambil kebijakan jangka pendek dan panjang dalam upaya penyediaan bahan baku farmasi berbasis bio teknologi dan herbal daripada impor bahan baku kimiawi. Harapannya Indonesia bisa segera berdaulat dalam industri farmasi," harap Sukamta.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

RUU Omnibus Law Ciptaker

HNW: Jangan Rugikan Buruh & Bertentangan dengan UUD

demi kemaslahatan semuanya, DPR juga perlu mendengarkan dan mengakomodasi banyak kritik dan penolakan dari elemen-elemen bangsa lainnya, seperti yang disampaikan oleh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia dan lain sebagainya

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

Jakarta (24/08) — Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan sejumlah organisasi buruh seperti KSPI, KSPSI dan lainnya terkait koreksi dan perbaikan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Ciptaker (RUU Ciptaker) dan meminta DPR juga memperhatikan koreksi dan keberatan sejumlah elemen bangsa lainnya terkait RUU itu.

“Beberapa kesepakatan yang mengakomodasi koreksi dan kepentingan buruh, KSPSI

& KSPI itu perlu diapresiasi. Dan DPR juga harus konsekuen melaksanakan kesepakatan itu, dengan memasukannya ke dalam aturan perundangan. Selain itu, demi kemaslahatan semuanya, DPR juga perlu mendengarkan dan mengakomodasi banyak kritik dan penolakan dari elemen-elemen bangsa lainnya, seperti yang disampaikan oleh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia dan lain sebagainya,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (24/08).

HNW sapaan akrabnya menuturkan bahwa persoalan yang ada dalam RUU Ciptaker

tersebut bukan hanya ketentuan yang ada dalam klaster ketenagakerjaan, melainkan ada banyak substansi yang bermasalah dan menimbulkan penolakan dari berbagai elemen bangsa, seperti masalah Pers, Jaminan Produk Halal, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Hubungan Pusat dengan Daerah dan lain-lain.

Lebih lanjut, HNW menyebutkan dari sudut konstitusi dan hirarki perundangan salah satu yang bermasalah secara mendasar dan belum ada perbaikan hingga saat ini adalah Pasal 170 RUU Ciptaker yang memberi kewenangan berlebih kepada Pemerintah, dengan melegalkan ketentuan yang tak sesuai dengan UUDNRI 1945, sekaligus downgrade dan merampas kewenangan konstitusional DPR dalam proses legislasi.

Ketentuan Pasal 170 ayat (1) yang kontroversial itu berbunyi, ‘Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini pemerintah



pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam undang-undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini.’

Sedangkan, Pasal 170 ayat (2) menyebutkan perubahan ketentuan dalam UU itu dilakukan melalui peraturan pemerintah (PP) dan untuk itu pada ayat (3) menyebutkan Pemerintah dapat berkonsultasi dengan Pimpinan DPR.

HNW menyebutkan bahwa ketentuan itu jelas-jelas tak sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang,

dan peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, bukan justru untuk mengubah undang-undang sebagaimana dalam RUU tersebut.

Selain itu, dalam pembuatan /perubahan suatu UU, bila itu inisiatif dari Pemerintah, maka Pemerintah tidak cukup hanya ‘dapat berkonsultasi dengan Pimpinan DPR’ sebagaimana dalam RUU tersebut, melainkan ‘wajib’ memahaminya dengan DPR, bukan sekadar dengan Pimpinan DPR.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Fraksi PKS Perkuat Sinergitas Perjuangan Agenda Keumatan dan Kebangsaan dengan Fraksi PPP



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

“Kita ingin agar umat Islam Indonesia sebagai umat mayoritas memiliki representasi yang memadai di parlemen melalui partai-partai Islam sehingga bukan saja kepentingan umat yang rahmatan lilalamin dapat dijaga dan diperjuangkan, lebih dari itu umat dapat berpartisipasi dan berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan nasional untuk memajukan Indonesia yang kita cintai bersama

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Fraksi PKS Perkuat Sinergitas Perjuangan Agenda Keumatan dan Kebangsaan dengan Fraksi PPP



Senayan (25/8) - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini didampingi Sekretaris Fraksi Ledia Hanifa Amalia dan Anggota Fraksi Ecky Awal Mucharam, Nasir Jamil, dan Bukhori Yusuf melaksanakan kunjungan silaturahmi ke jajaran Pimpinan dan Anggota Fraksi PPP di DPR RI pada hari ini Selasa (25/8).

Menurut Jazuli Juwaini silaturahmi ke Fraksi PPP ini dalam rangka mengkokohkan eksistensi dan agenda keumatan dan kebangsaan, di lingkup DPR khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

"Dari sisi usia, Fraksi PPP merupakan Fraksi Islam tertua yang ada di parlemen ini sehingga penting bagi Fraksi PKS untuk saling mengkokohkan agenda-agenda keumatan dan kebangsaan bersama representasi umat yang ada di DPR RI," ujar Jazuli.

Kita ingin agar umat Islam Indonesia sebagai umat mayoritas memiliki representasi yang memadai di parlemen melalui partai-partai Islam sehingga

bukan saja kepentingan umat yang rahmatan lilalamin dapat dijaga dan diperjuangkan, lebih dari itu umat dapat berpartisipasi dan berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan nasional untuk memajukan Indonesia yang kita cintai bersama.

"Sejumlah agenda legislasi krusial kita bicarakan dalam kerangka kepentingan keumatan, kerakyatan dan kebangsaan seperti RUU Pemilu, RUU Omnibus Law, juga RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama dan lain-lain," ungkap Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini berharap kerjasama, sinergi, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan Fraksi PPP terus terjalin dan semakin kokoh karena dalam sejumlah isu keumatan dan kebangsaan dalam rangka penguatan karakter dan ahlak mulia bangsa, Fraksi PPP memiliki komitmen yang kuat. Diantaranya dalam proses legislasi UU Pesantren, RUU Minuman Beralkohol, serta RUU KUHP.

Sejumlah agenda legislasi krusial kita bicarakan dalam kerangka kepentingan keumatan, kerakyatan dan kebangsaan seperti RUU Pemilu, RUU Omnibus Law, juga RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama dan lain-lain

**Dr. H. JAZULI
JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Samakan Persepsi dalam Urusan Keummatan, Kerakyatan, dan Kebangsaan

Fraksi PKS Silaturahmi ke Fraksi PKB DPR RI

Kedatangan kami yang utama adalah silaturahmi sebagaimana yang sebelumnya dikomunikasikan kepada ketua Fraksi PKB. Dan yang selanjutnya untuk mendapatkan masukan serta membangun kesamaan persepsi dengan Fraksi PKB, terkait dengan RUU yang sedang dibahas di Baleg yakni RUU Perlindungan Ulama yang dirubah menjadi RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (24/08) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI melakukan kunjungan atau silaturahmi ke kantor Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, di Gedung Nusantara 1, Jakarta, Senin, (24/08).

Dalam kunjungannya, Fraksi PKS dipimpin Ketua Fraksi Jazuli Juwaini bersama Sekretaris FPKS Ledia Hanifa Amaliah, Anggota Komisi VIII FPKS Bukhori Yusuf, Anggota Komisi II

FPKS Almuzamil Yusuf dan Mardani Ali Sera serta Anggota Komisi III FPKS Nasir Djamil.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, saat sambutannya mengatakan kedatangannya ke kantor Fraksi PKB DPR RI untuk bersilaturahmi sekaligus juga untuk meminta masukan terkait dengan sejumlah RUU yang diinisiasi Fraksi PKS DPR RI.

"Kedatangan kami yang

utama adalah silaturahmi sebagaimana yang sebelumnya dikomunikasikan kepada ketua Fraksi PKB. Dan yang selanjutnya untuk mendapatkan masukan serta membangun kesamaan persepsi dengan Fraksi PKB, terkait dengan RUU yang sedang dibahas di Baleg yakni RUU Perlindungan Ulama yang dirubah menjadi RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama," ungkap Anggota Komisi I DPR RI ini.

Jazuli menambahkan pihaknya meminta Fraksi PKB untuk menyempurnakan draft yang sudah dibuat oleh Fraksi PKS terutama dalam RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama yang diinisiasi oleh PKS ini.

"Kami minta Fraksi PKB untuk menyempurnakan draft yang sudah kami buat, karena kami mengetahui Fraksi PKB termasuk yang mendukung RUU Tokoh dan Simbol Agama yang kami gilirkan. RUU ini kalau bisa masuk ke Baleg, karena ini banyak menyangkut ulama, kyai dan tokoh agama yang



harus kita lindungi", tutur Anggota DPR asal Banten II ini.

Lebih lanjut Jazuli mengatakan selain RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama, yang menjadi fokus Fraksi PKS adalah pada besaran Parliamentary Threshold (PT). Ada yang mengusulkan 7.

"Kalau RUU Pemilu salah satu yang menjadi fokus Fraksi PKS adalah pada besaran Parliamentary Threshold (PT). Ada yang mengusulkan 7. Namun kami Fraksi PKS sendiri mengusulkan PT 5. Kami berharap kenaikan dilakukan secara bertahap atau gradual sehingga penyerderhanaan terjadi secara alami, dengan kesadaran, dan tanpa paksaan. Selain itu juga, Kami ingin

proses demokrasi di Indonesia berjalan kondusif dan tidak konfliktual di masyarakat akibat pemasangan politik yang drastis," tutur Jazuli.

Sementara itu, terkait dengan RUU Omnibus Law, Jazuli menyadari bahwa Fraksi PKB ini koalisi pemerintah, jadi sikapnya pasti mendukung.

"Namun Fraksi PKS mengajak, agar RUU Omnibus Law yang nantinya dibahas, tetap dalam koridor konstitusional, mengedepankan kepentingan rakyat kecil dan UMKM, serta menjaga kepentingan dan kedaulatan nasional atas sumber daya dan aset-aset strategis bangsa," tegas Jazuli mengakhiri.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



FPKB

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Rakyat

Samakan Persepsi dalam
Urusan Keummatan,
Kerakyatan, dan Kebangsaan

Fraksi PKS Silaturahmi ke Fraksi PKB DPR RI

Kedatangan kami yang utama adalah silaturahmi
sebagaimana yang sebelumnya dikomunikasikan kepada
ketua Fraksi PKB. Dan yang selanjutnya untuk mendapatkan
masukan serta membangun kesamaan persepsi dengan Fraksi
PKB, terkait dengan RUU yang sedang dibahas di Baleg yakni
RUU Perlindungan Ulama yang dirubah menjadi RUU
Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Wacana Mata Kuliah Pendidikan Militer di Perguruan Tinggi

Toriq: Perlu Dikaji Lebih Dalam

“Saya berharap Kemenhan dan Kemdikbud mengkaji kurikulum terlebih dahulu. Apa tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai. Kalau memang berbeda dengan wajib militer maka harus diperjelas apa perbedaannya

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Tasikmalaya (20/08) — Sambut tahun baru Islam 1442 H di masa pandemi, Toriq Hidayat menyampaikan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Bangsa Indonesia hingga saat ini.

“Nikmat yang paling besar dirasakan saat ini adalah Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi masa pandemi saat ini. Oleh karenanya kita wajib bersyukur atas nikmat-Nya. Barangsiapa bersyukur, Allah SWT akan menambah nikmat-Nya”, ungkap Toriq.

Berbicara ketahanan, Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berwacana untuk menerapkan pendidikan militer di perguruan tinggi. Kementerian Pertahanan

menjelaskan bahwa pendidikan militer berbeda dengan wajib militer dan menjadi mata kuliah pilihan bukan mata kuliah wajib.

Terkait wacana ini, Anggota Komisi I DPR RI asal Fraksi PKS akan memastikan kepada Kementerian Pertahanan. Toriq berharap agar wacana penerapan pendidikan militer di perguruan tinggi harus dikaji terlebih dahulu.

“Saya berharap Kemenhan dan Kemdikbud mengkaji kurikulum terlebih dahulu. Apa tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai. Kalau memang berbeda dengan wajib militer maka harus diperjelas apa perbedaannya,” jelasnya.

Toriq menambahkan bahwa saat ini sudah ada mata kuliah wajib yang secara garis

besar bertujuan untuk membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika pendidikan militer ini bertujuan hampir sama dengan mata kuliah yang sudah ada maka tidak perlu lagi ada mata kuliah pendidikan militer. Cukup memperbaiki kurikulumnya.

“Pada prinsipnya kami setuju langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam rangka membangun karakter anak bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti wacana mata kuliah pendidikan militer ini, asalkan dikaji terlebih dahulu dan dijelaskan kepada publik”, tutupnya.



Jika itu juga segera diikuti oleh negara-negara teluk Oman dan Bahrain kemudian negara teluk ini akan betul-betul terbelah, kemungkinan terbesar yang menjalin hubungan resmi dengan Israel dengan yang tidak pro Israel

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Legislator PKS: Normalisasi Hubungan UEA-Israel Berpengaruh Terhadap Perubahan Geopolitik Timur Tengah

Jakarta (22/08) — Anggota

Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta menilai, normalisasi hubungan Uni Emirat Arab (UEA) dengan Israel akan berpengaruh terhadap perubahan geopolitik di Timur Tengah.

Diketahui, hubungan Israel dan Uni Emirat Arab kini makin akur usai menekan perjanjian diplomatik.

Perjanjian itu akan diikuti dengan perjanjian lainnya, termasuk bekerja sama untuk mengembangkan alat tes Corona.

Normalisasi Hubungan UEA-Israel Berpengaruh Terhadap Perubahan Geopolitik Timur Tengah

Sukamta khawatir langkah UEA akan diikuti oleh negara-negara teluk lainnya.

Hal itu disampaikan dalam webinar bertajuk 'Pergerakan Geopolitik Timtengah pasca Perjanjian UEA-Israel dan Ledakan Lebanon serta Respons Kebijakan Luar Negeri RI', Sabtu (22/8/2020).

"Saya melihat normalisasi ini berpengaruh terhadap perubahan geopolitik di Timur Tengah, di Oman dan Bahrain itu dikabarkan akan menyusul akan melakukan normalisasi," kata Sukamta.

Sukamta menilai, jika Oman dan Bahrain mengikuti jejak UEA membuka hubungan diplomatik dengan Israel, akan menimbulkan dua faksi negara yang pro dan kontra terhadap Israel.

"Jika itu juga segera diikuti oleh negara-negara teluk Oman dan Bahrain kemudian negara teluk ini akan betul-betul terbelah, kemungkinan terbesar yang menjalin hubungan resmi dengan Israel dengan yang tidak pro Israel," ucapnya.

Sukamta juga menilai pembagian pengaruh dapat meluas ke Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), antara pemimpin saat ini Arab Saudi berhadapan dengan Turki.

Ia melihat, dalam beberapa pertemuan upaya dalam kemerdekaan Palestina tidak terlalu digaungkan di dunia internasional.

"Tentu ini cukup menarik untuk kita amati tetapi cukup memprihatinkan bagi kita, bagi negara yang konsen dalam upaya kemerdekaan Palestina," ujarnya.

Untuk menyikapi itu, Sukamta menyarankan pemerintah Indonesia harus memperimbangkan norma dan aspirasi masyarakat, serta perlu jeli dalam memetakan situasi dan kondisi Timur Tengah.

"Sedapat mungkin tidak masuk dalam wilayah konflik dan dapat menjalin kerja sama dengan semua pihak yang menguntungkan kepentingan nasional," pungkasnya.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



"Aneh memang kalau terbakar dan dalam waktu yang lama api baru bisa dipadamkan. karena itu, perlu dilakukan pengujian secara forensik terkait kebakaran itu

HM. Nasir Djamil, M.Si.
Anggota Komisi III DPR RI



"Melihat besarnya api dan cepatnya api menyebar, tentunya menjadi pertanyaan bagi banyak pihak. Hal ini tentunya perlu diberikan penjelasan yang baik oleh kejaksaan. Apa yang menyebabkan kebakaran dan kenapa bisa langsung besar seperti itu

Habib Aboe Bakar Alhabsyi
Anggota Komisi III DPR RI

Kebakaran Kejagung
Perlu Uji Forensik

Korsleting Listrik Atau Sabotase?

Nasir Djamil: Kebakaran Kejagung Perlu Uji Forensik, Korsleting Listrik Atau Sabotase?

“Aneh memang kalau terbakar dan dalam waktu yang lama api baru bisa dipadamkan. karena itu, perlu dilakukan pengujian secara forensik terkait kebakaran itu. Apakah (kebakaran dipicu) karena korsleting listrik atau ada pihak yang lakukan sabotase

H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (23/08) — Perlu penyelidikan mendalam terhadap insiden terbakarnya gedung lama Kejaksaan Agung RI, Sabtu malam (22/8) sekitar pukul 19.20 WIB. Penyelidikan penting dilakukan lantaran belakangan, anggapan adanya sabotase makin berkembang di tengah publik.

“Bisa benar juga anggapan (sabotase) publik ini. Meskipun gedung itu merupakan bangunan lama,” kata anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (23/08).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini merasa aneh dengan peristiwa kebakaran yang menghancurkan bangunan enam lantai tersebut. Meski

belum dapat dipastikan dokumen apa saja yang terbakar dalam gedung tersebut, namun Nasir meminta agar aparat kepolisian melakukan uji forensik mengenai penyebab utama kebakaran tersebut.

“Aneh memang kalau terbakar dan dalam waktu yang lama api baru bisa dipadamkan. karena itu, perlu dilakukan pengujian secara forensik terkait kebakaran itu. Apakah (kebakaran dipicu) karena korsleting listrik atau ada pihak yang lakukan sabotase,” tandasnya.

Belakangan, kasus korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra menjadi sorotan publik pasca terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Seperti yang

disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

Dalam kasus ini, jaksa Pinangki Sirna Malasari resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sementara kantor jaksa Pinangki ada di dalam gedung yang terbakar. Artinya, ada kemungkinan rekaman CCTV dan alat sadap aktivitas jaksa Pinangki akan hilang.

“Paling tidak oknum Jaksa P itu kan juga berkantor disitu kan dulunya. Paling tidak kegiatan-kegiatan dia tuh apa aja, kan karena nyatanya ada dugaan Anita dan R itu yang juga diduga mengantar Djoko Tjandra itu kan juga pernah bertemu di kantor itu kan,” urainya



Dirgahayu ke-75 Mahkamah Agung

Tetap Semangat Hadirkan Keadilan di tengah Masyarakat Indonesia

Semangat baru dalam peradilan di negara kita, tentunya bertujuan agar terwujud peradilan di Indonesia yang imparisial, dan dilaksanakan dengan mudah, cepat serta biaya ringan. Dengan demikian, harapan kedepannya, MA akan dapat menghadirkan rasa keadilan di tangan masyarakat Indonesia

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (19/08) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsy mengucapkan Selamat Ulang Tahun yang ke-75 bagi Mahkamah Agung, yang diperingati secara virtual, Selasa, (18/08/2020).

"Saya ucapkan Dirgahayu Mahkamah Agung yang ke-75, harapan kita peringat HUT MA ini akan membawa semangat baru dalam reformasi peradilan di Indonesia," harap pria yang akrab disapa Habib Aboe ini.

Habib Aboe melanjutkan,

semangat baru dalam peradilan di negara kita, tentunya bertujuan agar terwujud peradilan di Indonesia yang imparisial, dan dilaksanakan dengan mudah, cepat serta biaya ringan.

"Dengan demikian, harapan kedepannya, MA akan dapat menghadirkan rasa keadilan di tangan masyarakat Indonesia," ungkap Anggota DPR Dapil Kalsel 1 ini.

Menurut Habib Aboe, pada era pandemi seperti saat ini, MA memiliki tantangan yang tidak mudah. Pada satu sisi MA memiliki kewajiban untuk tetap

menyelenggarakan proses peradilan, pada sisi lain MA bertanggung jawab untuk menjaga keamanan para personelnnya.

"Oleh karenanya, hal ini harus mendapatkan atensi secara baik dan diputuskan dengan hati-hati," terang Ketua Majelis Kehormatan Dewan ini.

Habib Aboe berharap, MA harus benar-benar memperhatikan situasi lapangan, semisal adanya 5 pegawai PN Denpasar yang positif Covid-19, atau seperti adanya seorang hakim PN Jakarta Pusat yang juga dinyatakan positif Covid-19.

"Tentunya Perlu diambil Langkah cepat untuk melokalisir persoalan ini. Jangan sampai pengadilan menjadi cluster baru penyebaran Covid-19," tukasnya.

"Semoga dengan semangat HUT MA ke 75, jajaran MA akan dapat melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman pada protokol Kesehatan," tambah Habib Aboe penuh harap.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Terkait RUU Omnibus Law

Aleg PKS: Hati-hati Indonesia Diserahkan Tanpa Syarat ke Investor

"Kita akan berupaya maksimal untuk melawan. Jangan sampai ini kejadian Negara sebesar Indonesia ini diserahkan ke investor dengan tanpa syarat. banyak pasal-pasal yang tidak hanya memudahkan, tapi menghilangkan persyaratan-persyaratan perijinan yang sangat krusial." Ini masalah yang sangat penting jadi fokus kita dari Fraksi PKS

drh. H. Slamet
Anggota Komisi IV DPR RI

Terkait RUU Omnibus Law

Aleg PKS: Hati-hati Indonesia Diserahkan Tanpa Syarat ke Investor

“Kita akan berupaya maksimal untuk melawan. Jangan sampai ini kejadian Negara sebesar Indonesia ini diserahkan ke investor dengan tanpa syarat

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Sukabumi (22/08) — Omnibus Law (OBL) atau RUU Cipta Kerja lagi-lagi menarik perhatian anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan (FPKS), Slamet.

RUU cipta kerja kali ini, menurut Slamet, khususnya terkait perkebunan, diduga Negara akan diserahkan tanpa syarat kepada investor.

“Kita akan berupaya maksimal untuk melawan. Jangan sampai ini kejadian Negara sebesar Indonesia ini diserahkan ke investor dengan tanpa syarat,” tegas Slamet kepada wartawan.

Slamet menjelaskan, banyak pasal-pasal yang tidak hanya memudahkan, tapi menghilangkan persyaratan-persyaratan perijinan yang

sangat krusial. “Ini masalah yang sangat penting jadi fokus kita dari Fraksi PKS,” ujar Slamet.

“Kami juga menolak liberalisasi perkebunan dalam RUU OBL ini, karena dalam RUU ini memperlihatkan keberpihakan kepada importir, pengusaha asing dan oligarki,” tambah Slamet.

Selain itu, sambung Slamet, pihaknya juga menolak penggelapan hak atas tanah dan juga menolak peralihan kepemilikan tanah tanpa syarat.

“Ada beberapa pasal yang dianggap bermasalah dalam RUU cipta kerja. Terutama yang terkait perubahan UU No 39 tentang perkebunan,” jelasnya.

“Dalam pasal 15 ada peluang bagi perusahaan perkebunan untuk menjual HGU, pasal 16 ada peluang untuk menguasai lahan tanpa usaha pengusaha dan pasal 39 memberikan peluang bagi korporasi asing berusaha di Indonesia secara penuh tanpa bekerjasama dengan pengusaha dalam negeri,” ujar Slamet.

Selain itu, sambung Slamet, ada tujuh pasal lain yang dianggap bermasalah. Diantaranya yaitu pasal 48 dan 50. Keduanya terkait kewenangan pengawasan Kepala Daerah dan kewenangan Menteri dan Kepala Daerah.

“Selanjutnya pasal 58, 67, 68, 74 dan terakhir pasal 93. Dan yang paling penting perkebunan tetap memperhatikan lingkungan hidup, AMDAL dan lain lain,” pungkas Slamet.



Food Estate Tidak Dibahas di Komisi Pangan

Politisi PKS: Anggaran Triliunan Mubazir

Mestinya program yang berkaitan dengan pangan menjadi ranah tupoksi Kementan. Pembahasannya di Komisi IV DPR, mulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi dan pengawasan

Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (28/08) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto mengungkapkan, Pemerintah mengajukan anggaran sebesar Rp 9,53 triliun pada RAPBN 2021 untuk proyek pembangunan lumbung pangan atau food estate.

Tetapi, Menurut Hermanto, anggaran tersebut dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sementara Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian yang terkait langsung dengan pangan, anggarannya dialokasikan Rp. 21,6 triliun.

"Mestinya program yang berkaitan dengan pangan menjadi ranah tupoksi Kementan. Pembahasannya di Komisi IV

DPR, mulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi dan pengawasan", papar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

"Dis-alokasi anggaran semacam ini dapat menimbulkan duplikasi anggaran, program ganda, tumpang tindih program, tidak efisien dan tidak efektif yang dapat menimbulkan pembubaziran", tambahnya.

Sejauh ini, ungkapnya, program food estate ini tidak pernah dibahas di Komisi IV yang membidangi Pangan.

"Mekanisme regulasi dan pengawasan bidang pangan ada di Komisi IV. Tetapi terkait food estate, Komisi IV tidak melibatkan sama sekali", ujar

legislator dari FPKS ini.

Hermanto berpendapat, seharusnya anggaran tersebut masuk kedalam anggaran Kementan sehingga Komisi IV dapat mensinergikan food estate dengan program pangan nasional.

"Jika food estate tetap di PUPR maka anggaran sebesar Rp 9,57 triliun tersebut tidak sinergi mewujudkan target pangan nasional yaitu kedaulatan pangan", ucapnya.

"Tidak terkonsolidasinya food estate dengan Komisi IV dan Kementan, maka akan sulit untuk mewujudkan kedaulatan pangan", pungkas legislator dari dapil Sumbar I ini.



Sektor Perkebunan Sangat Strategis

Aleg PKS: Regulasinya Sudah Tepat

Regulasi tentang perkebunan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan peraturan dasar yang ideal pada kondisi saat ini. Perlindungan terhadap penguasaan asing sudah terakomodir baik

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (24/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menilai regulasi yang mengatur sektor perkebunan saat ini masih sangat relevan dipertahankan dan di terapkan.

Menurut pria yang akrab disapa Akmal, soal perkebunan hanya perlu penguatan peraturan pemerintahnya dan implementasi yang disiplin sesuai ketentuan dalam menjalankan proses pelaksanaannya.

"Regulasi tentang perkebunan menurut Akmal, yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan peraturan dasar yang ideal pada kondisi saat ini. Perlindungan terhadap penguasaan asing sudah terakomodir baik,"

paparnya.

Kepemilikan asing, kata Akmal, sudah diatur dengan jelas dalam UU existing. Bahkan dalam proses penyusunannya penuh dengan kajian, analisa dialog berbagai stake holder mengganti dan mencabut Undang-Undang sebelumnya yang sudah berjalan 10 tahun yakni UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

"Pada pasal 40 UU perkebunan, ada klausul Pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri. Tapi pada draft RUU Cipta Kerja ketentuan ini dihapus. Ini Sangat Berbahaya",

tukas Akmal.

Akmal mengatakan, Fraksi PKS menganggap penghapusan ketentuan pasal 40 ini dapat berimplikasi kepada peralihan hak kepemilikan perusahaan kepada pemodal asing secara bebas tanpa ada pengendalian khususnya apabila terkait dengan kepentingan nasional.

"Sudah ada contohnya pada sektor pertambangan. Sebut saja Penguasaan Emas di timur Indonesia, Negara kita tidak seberapa atas eksploitasi tambang ini. Begitu juga Sektor perkebunan, ancaman penguasaan asing telah menghadang bila regulasi kita model seperti ini," ungkapnya.

Politisi PKS ini menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

"Sangat jelas bahwa sektor perkebunan ini tersusun atas aset tanah dan sdm yang sangat besar. Kontribusi terhadap pangan dari sektor perkebunan ini sama



strategisnya dengan sektor energi dan kesehatan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Penjahaj negeri ini raturan tahun awalnya tergiur pada sektor perkebunan. Jangan sampai negara kita terjajah kembali dalam bentuk baru di jaman modern", Akmal

mengingatkan Pemerintah.

Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan, juga menyeroti dihapusnya aturan terkait perizinan yang termaktub pada pasal 45 Undang-Undang Perkebunan di RUU Cipta Kerja.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Tanggapan Pemerintah Soal Ketahanan Pangan hanya Retorika dan Tidak Berdasar Fakta

Jika kita melihat data indeks ketahanan pangan global menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi 65 di dunia dan posisi kelima di ASEAN, jadi sebenarnya masih jauh ketinggalan dibanding negara lain padahal kita memiliki sumberdaya produksi pangan yang luar biasa dibanding negara lain

H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (25/08) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai, apa yang disampaikan pemerintah terhadap pandangan Fraksi-fraksi DPR atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019 pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, (25/08) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Khususnya tentang ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, Menurut Johan, hanya bersifat retorika dan tidak berdasar pada acuan data yang sebenarnya.

"Jika kita melihat data

indeks ketahanan pangan global menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi 65 di dunia dan posisi kelima di ASEAN, jadi sebenarnya masih jauh ketinggalan dibanding negara lain padahal kita memiliki sumberdaya produksi pangan yang luar biasa dibanding negara lain," ujar Johan.

Politisi PKS ini berujar, jika memang Pemerintah telah bekerja keras melakukan apa yang sudah disampaikan tersebut maka mungkin petani kita sudah maju dan sejahtera, sebab kenyataannya masih banyak kabupaten yang

mengalami kerentanan pangan.

"Fluktuasi harga pangan yang tidak terkendali, ketergantungan impor pangan yang sangat tinggi serta kesejahteraan petani yang terus menurun," ungkapnya.

Selanjutnya, Johan juga mempertanyakan dimana dukungan Pemerintah untuk peningkatan produksi pangan pada tahun 2019 lalu, karena selama empat tahun terakhir produksi tanaman pangan dalam negeri mengalami perlambatan sangat signifikan.

"Kita selalu tergantung-impor pangan, bahkan impor beras mencapai 2,25 juta ton, yang hal ini merupakan yang terbesar nilai importnya sejak 2011," urai Johan.

Legislator dari dapil NTB 1 ini menilai Pemerintah tidak serius menjadikan sektor Pertanian sebagai prioritas dalam menciptakan lapangan kerja padahal pada tahun 2019 pertanian sebagai penyumbang terbesar lapangan pekerjaan yang mencapai 29 persen dari total penyerapan tenaga kerja.

"Pada kesempatan ini, saya mendorong pemerintah untuk lebih fokus mengembangkannya sektor Pertanian sebagai



lokomotif ekonomi dan kekuatan bangsa menuju kedaulatan pangan," seru Johan.

Wakil Rakyat dari Pulau Sumbawa ini juga menyatakan bahwa program pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan masih banyak yang tidak tepat sasaran.

"Seperti subsidi pupuk yang masih banyak penyelewengan di lapangan,

rendahnya verifikasi dan validasi data serta distribusi yang tidak merata dan tidak tepat waktu," terang Johan.

Johan berharap Pemerintah memperbaiki tata Kelola sektor Pertanian yang lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan petani.

"Pada saat ini pemerintah harus segera menunjukkan bentuk perlindungan kepada petani dalam setiap programnya," tutup Johan.

Pemerintah Jangan asal gunakan INFLUENCER



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kental Nuansa Politik

Mendengar mereka mengatakan tidak tahu menahu jika unggahan dengan biaya 10 juta rupiah per postingan ternyata bernuansa politik, menunjukkan kegiatan ini tidak transparan

H. Sukamta, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Pemerintah Harus Transparan

pemerintah perlu menjelaskan tujuan penggunaan influencer dalam proses komunikasi publik. Saya khawatir jika tujuannya untuk mempengaruhi opini publik dengan cara instan dan masif agar setuju atau membenarkan kebijakan pemerintah

Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Lebih baik untuk Masyarakat

Jauh lebih bermanfaat jika anggaran itu digunakan untuk memberi subsidi BPJS yang dirasakan berat oleh masyarakat bawah, atau subsidi gas 3 kg, atau untuk penanganan kesehatan masyarakat

Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si.

Anggota Komisi XI DPR RI



Aleg PKS: Jalur Khusus di Jalan Tol Bahayakan Pesepeda

Tidak tepat rencana membuka jalan tol untuk pesepeda. Itu justru akan membahayakan keselamatan pesepeda

H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Bekasi (27/08) — Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi jalur bagi pesepeda di jalan tol, mendapat tanggapan dari Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikh.

Menurut Syaikh, usulan tersebut tidak tepat karena akan membahayakan pesepeda dan pengguna jalan tol

"Tidak tepat rencana membuka jalan tol untuk pesepeda. Itu justru akan membahayakan keselamatan pesepeda," ujar Syaikh.

Seperti diberitakan, Anies mengirim surat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk membuka Tol Lingkar Dalam Jakarta (Cawang-Tanjung Priok) sisi barat untuk jalur sepeda. Ini guna mengakomodir pengguna sepeda setiap hari Minggu pukul 06.00-09.00 WIB.

Anies mengusulkan itu da-

lam upaya menyehatkan warga DKI dan menjamin keselamatan warga dalam bersepeda, agar tidak bercampur dengan kendaraan bermotor.

Namun demikian pemberian ijin tersebut tidaklah mudah. Sebab pada UU No.38 tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa 'Jalan tol hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor'.

Walaupun pada ayat 3 disebutkan pula bahwa 'Penggunaan jalan tol selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan persetujuan Pemerintah'.

Politisi PKS itu menjelaskan, penggunaan jalan tol layak untuk sepeda sangat berbahaya karena adanya terpaan angin kencang dari sisi kanan, kiri, depan bahkan belakang. Kondisi ini bisa

membuat pesepeda kehilangan keseimbangan. Sehingga dapat berakibat fatal yakni terjatuh atau tidak bisa mengendalikan sepedanya.

"Angin itu datang dari berbagai penjuru. Jika sedang bertiup kencang, maka berpotensi membuat pe-sepeda oleng atau hilang keseimbangan," kata Syaikh.

Selain itu, penggunaan jalan tol bagi pesepeda yang setiap hari minggu, dikhawatirkan mengganggu pengguna jalan tol. Mereka sudah membayar kewajibannya, namun haknya dikurangi karena ada penerapan contraflow akibat dari penutupan sementara pada satu jalur jalan tol tersebut.

"Jelas ini akan merugikan pengguna jalan tol. Padahal mereka sudah membayar," ujar Syaikh lagi.

Sebenarnya, lanjut Syaikh, pengaturan terkait jalur khusus sepeda di jalan umum sudah ada dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terdapat pada pasal 25, 45, 62, dan 106 UU tersebut. Sehingga jika jalur sepeda yang ada saat ini masih dirasa kurang



memadai, dengan aturan yang ada tersebut, Pemerintah dapat memanfaatkan jalan umum bagi kenyamanan dan keselamatan pengguna sepeda.

"UU Nomor 22 Tahun 2009 bisa jadi payung hukum yang tepat untuk memberikan jalur khusus pesepeda di jalur utama," ungkap Syaikh.

Jika faktor pemandangan menjadi pertimbangan utama, maka ada beberapa ruas jalan layang non tol yang dapat jadi pilihan, yakni Jalan Layang Non

Tol Antasari dan Casablanca. Keduanya dapat digunakan untuk jalur khusus bersepeda pada waktu tertentu, sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jalan tol dan tidak mengurangi hak pengguna jalan tol.

"Jalan Layang Non Tol Antasari dan Casablanca jadi opsi jika pertimbangannya adalah pemandangan indah bagi pesepeda," saran Syaikh.

Soal Investasi

Aleg PKS: Kewenangan Pusat Terlalu Besar pada RUU Cipta Kerja

Jangan Sampai status aset negara yang berubah menjadi milik lembaga. Ini sama saja melanggar Undang-Undang dasar yang memberikan jaminan hidup bagi seluruh warga negara. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (24/08) — Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuirina menilai pasal tentang Investasi pada RUU Cipta Kerja yang secara khusus tercantum dalam Bab X tentang Investasi menjadi pintu yang sangat lebar penguasaan asing atas aset strategis negara kita yakni lahan.

Bahkan ketentuan pasal tentang investasi ini, tersebar dalam Bab dan Pasal lainnya terkait penanaman modal asing diberbagai sektor di tanah air.

Nevi mengatakan, Fraksinya memberi 3 catatan penting tentang Bab X ini. Pertama, Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Kedua, lanjutnya, tujuan dan skema investasi yang dilakukan berpotensi menabrak UUD NRI Pasal 33 dan Ketiga, Persoalan aspek kelembagaan juga menjadi poin penting untuk diperbaiki.

"Ada yang timpang pada RUU Cipta Kerja ini. Besarnya kewenangan pusat dengan

mengkerdilkan kewenangan daerah. Begitu besarnya kewenangan pusat, akan menjadi ruang yang sangat besar pada prilaku penyimpangan atas oknum. Sudah sering kejadian, dimana kekuasaan sangat besar akan menciptakan penyimpangan-penyimpangan", tutur Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini melanjutkan, bahwa berbahaya dihapusnya kalusul perizinan di RUU Cipta Kerja dimana aturan yang dihapus sudah diatur dengan jelas dalam UU existing akan mengakibatkan persoalan lanjutan.

"Kontrol investasi asing yang longgar ujungan adalah penguasaan lahan. Sebagai contoh ketentuan yang sangat meresahkan adalah di Bab III Pasal 29 tentang Kemudahan Pelaku Usaha mendapatkan perizinan, khususnya pelaku usaha asing," ungkapnya.

Pada Bab ini, RUU Cipta Kerja mengubah ketentuan



dalam UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Terkait investasi asing, setidaknya ada 2 pasal yang dihapus dalam Bab ini, yaitu pasal 39 ayat 2 dan 3, serta pasal 40.

"Jangan Sampai status aset negara yang berubah menjadi milik lembaga. Ini sama saja melanggar Undang-

Undang dasar yang memberikan jaminan hidup bagi seluruh warga negara. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Bila instrumen yang seharusnya dikuasai negara tapi dikuasai privat bahkan asing maka akan memicu ketidakadilan", kritis Nevi.

Anggota FPKS Desak Pemerintah Perbaiki Mekanisme Penyaluran Bantuan Modal UMKM

Agar bisa survive dan kemudian bangkit usahanya, maka pemerintah harus mampu memfasilitasi pemulihan pasar mereka. UMKM butuh panduan agar bisa shifting ke produk-produk yang banyak dibutuhkan konsumen

AMIN AK,M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (25/08) — Realisasi bantuan modal kerja bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui penyaluran kredit oleh bank-bank pelat merah dinilai tidak berjalan sesuai harapan. Setidaknya ada dua alasan yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi.

Pertama, minimnya pendampingan dan pembinaan UMKM terutama dalam konteks pemulihan pasar dari produk mereka. Kedua, program bantuan hanya terfokus pada restrukturisasi kredit semata, sehingga bank-bank penyalur terkesan asal menggugurkan kewajiban saja.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak dalam

keterangan tertulisnya, Selasa (25/8/2020). Akibatnya kebijakan yang baik dan diharapkan menjadi solusi menghindari resesi ekonomi itu tidak menyentuh akar permasalahan para pelaku UMKM.

Bantuan modal kerja memang diperlukan, namun kesulitan mendapatkan pasar akibat turunnya daya beli masyarakat merupakan hal yang jauh lebih berat bagi UMKM. Menurut Amin, jika modal kerja diibaratkan pertolongan pertama lewat bantuan pernafasan, maka pemulihan pasar merupakan pertolongan lanjutan agar pelaku UMKM bisa bangkit dan survive.

"Agar bisa survive dan

kemudian bangkit usahanya, maka pemerintah harus mampu memfasilitasi pemulihan pasar mereka. UMKM butuh panduan agar bisa shifting ke produk-produk yang banyak dibutuhkan konsumen," tegas Amin.

Saat ini lanjut Amin, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, dari total 64 juta pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Indonesia, 80% atau sekitar 51 juta di antaranya masih unbankable atau tidak mendapat bantuan pinjaman dari bank. Sehingga menurutnya, jumlah pelaku UMKM yang disasar pemerintah masih terlalu kecil.

Memang kemudian ada bantuan presiden sebesar Rp2,4 juta untuk 12 juta pelaku UMKM, namun proses verifikasi dan validasinya dalam waktu singkat tentunya tidak mudah. Amin berharap pemerintah mau jemput bola agar penerima bantuan betul-betul UMKM yang memang membutuhkan dengan tolok ukur yang jelas.

"Pemerintah menggelontorkan Rp30 triliun kepada bank-bank BUMN agar disalurkan ke UMKM. Namun outcomenya harus jelas karena



program ini menggunakan uang rakyat," kata Amin.

Selanjutnya untuk permasalahan kedua, menurut Amin, restrukturisasi kredit saja tidak cukup karena persoalan yang dialami UMKM akibat pandemi itu sangat kompleks. Restrukturisasi kredit hanya efektif bagi pelaku UMKM yang memiliki persoalan keuangan yang berat namun usahanya masih bisa berjalan dengan suntikan modal. Sedangkan kebanyakan pelaku UMKM banyak yang kehilangan pasar

karena turunnya daya beli masyarakat.

"Yang lebih memprihatinkan, bank-bank BUMN mempersyaratkan debitur melunasi utang lama mereka terlebih dahulu agar bisa memperoleh kredit baru. Ini jelas nggak menyelesaikan persoalan dan terkesan nyari aman. Padahal bank-bank tersebut juga harus bersama-sama aktif meminimalisir risiko," kata Amin.



Pemuseuman Pesawat N-250

Ujung Gelap Dunia Iptek & Inovasi

“

Keputusan memuseumkan pesawat N250 adalah sebuah ironi dalam pencapaian iptek dan inovasi nasional. Pesawat N250 yang semula digadagadag sebagai produk unggulan inovasi Indonesia kini ternyata berakhir tragis menjadi barang koleksi semata

Dr. H. Mulyanto, M.Eng.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI
Bidang Industri dan Pembangunan



Pertamina Rugi, Anggota Komisi VII Usul Ganti Ahok!

Secara teori, pada semester pertama tahun 2020 ini Pertamina harusnya untung. Bukan rugi seperti sekarang. Sebab disaat harga minyak dunia anjlok ke angka yang paling rendah sepanjang sejarah, Pertamina tidak menurunkan harga BBM sedikitpun. Termasuk harga BBM non-subsidi yang harganya mengikuti harga minyak dunia. Secara perhitungan kasar, Pertamina harusnya untung besar

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (25/08) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mempertanyakan kinerja Komisaris Utama PT. Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selama bergabung di perusahaan minyak negara itu.

Menurut Mulyanto selama Ahok menjabat sebagai komisaris utama, Pertamina nyaris tidak memiliki prestasi yang layak dibanggakan. Justru sebaliknya banyak keanehan dan kejanggalan yang begitu

terlihat masyarakat.

"Pekan lalu kita dengar kabar Pertamina tidak masuk daftar Fortune Global 500. Sekarang yang terbaru Pertamina rugi Rp 11,13 triliun di semester pertama tahun 2020," ungkap Mulyanto.

Kondisi ini, lanjutnya, jelas harus jadi perhatian Pemerintah. Jangan terus dibiarkan dan menunggu Pertamina mengalami kondisi yang lebih parah.

"Mau sampai kapan membiarkan Pertamina babak

belur seperti ini?" tanya Mulyanto.

Wakil Ketua FPKS Bidang Industri dan Pembangunan ini mempertanyakan kerja Ahok selama bergabung di Pertamina. Sebagai komisaris utama Pertamina Ahok harusnya mampu melakukan pengawasan agar perusahaan yang dipimpinnya lebih baik.

Dengan kewenangan yang dimiliki dan dukungan politik memadai, sebenarnya Ahok punya kesempatan lebih besar membenahi Pertamina. Apalagi menjelang pengangkatan dirinya menjadi komisaris utama, mantan Gubernur DKI itu sesumbar bisa memperbaiki Pertamina.

"Waktu itu Ahok bilang, merem saja Pertamina sudah untung. Asal diawasi. Nah kalau sekarang Pertamina rugi, artinya apa? Apa Ahok tidak mengawasi. Kok nyatanya Pertamina bisa rugi," kritik Mulyanto.

Secara teori, kata Mulyanto, pada semester pertama tahun 2020 ini Pertamina harusnya untung. Bukan rugi seperti sekarang.

Sebab disaat harga minyak dunia anjlok ke angka yang paling rendah sepanjang



sejarah, Pertamina tidak menurunkan harga BBM sedikitpun. Termasuk harga BBM non-subsidi yang harganya mengikuti harga minyak dunia.

"Secara perhitungan kasar, Pertamina harusnya untung besar," ujar Mantan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian era Presiden SBY ini.

Karena itu Mulyanto heran jika dalam laporan semester pertama tahun 2020 ini Pertamina malah rugi.

Mulyanto menduga ada faktor nonteknis yang menyebabkan Pertamina

mengalami rugi yang begitu besar. Untuk itu Mulyanto minta peran pengawasan Komisaris Utama lebih ditingkatkan.

Menurutnya Pemerintah jangan sungkan mengevaluasi kerja komisaris utama yang sekarang. Jika memang tidak mampu pekat saja. Ganti dengan figur profesional yang memahami kerja dunia perminyakan.

"Pertamina butuh gagasan besar. Bukan omong besar," tandas Mulyanto.

Kemenristek Harus Jadi 'Leading Sector' Riset Penanganan Covid-19

Saya sampai selidiki ke Unair. Ternyata laporan teman-teman Unair, laboratorium yang menghasilkan itu tidak layak untuk disebut sebagai laboratorium untuk meneliti obat Covid ini. Ternyata hasilnya pun disanggah oleh tiga profesor besar baik dari UI, ITB maupun Prof Sulis dari UGM. Saat itu seharusnya Pak Menteri bicara.

Ir. H. TIFATUL SEMBIRING

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (27/08) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Tifatul Sembiring menilai, sejatinya Menristek/Kepala BRIN memimpin pengembangan obat dan vaksin virus Corona.

Tifatul menyebut tentang adanya klaim vaksin Covid-19 oleh peneliti dari Universitas Airlangga beberapa waktu lalu yang ternyata hanya meramu tiga buah obat untuk mengobati gejala Covid-19 saja.

Bahkan, imbuhnya, labora-

torium yang digunakannya pun dinilai tidak layak sebelum akhirnya BPOM mengembalikan kembali hasil riset tersebut karena dinilai tidak layak.

"Saya sampai selidiki ke Unair. Ternyata laporan teman-teman Unair, laboratorium yang menghasilkan itu tidak layak untuk disebut sebagai laboratorium untuk meneliti obat Covid ini. Ternyata hasilnya pun disanggah oleh tiga profesor besar baik dari UI, ITB maupun Prof Sulis dari UGM. Saat itu

seharusnya Pak Menteri bicara," ungkap Politisi PKS ini.

Menjawab hal itu, Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro menjelaskan, peran Menteri BUMN terkait vaksin Covid-19 itu karena ditunjuk langsung sebagai Kepala Pelaksana Komite Penanganan Covid-19, dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dimana di dalamnya terdapat beberapa menteri yang menjadi anggotanya.

"Mengenai vaksin, mungkin posisi Menteri BUMN bukan sebagai Menteri BUMN-nya, tapi sebagai ketua pelaksana dari Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional," jelasnya.

Sementara terkait penanganan Covid-19, yang dilakukan Kemenristek/BRIN telah masuk dalam tahap industri. Bahkan sudah masuk ke dalam pengadaan, sudah produksi massal, baik di Kemenkes maupun oleh satuan tugas seperti rapid test kit, ventilator dan seterusnya.



Freeport Minta Tunda Pengerjaan Smelter Gresik

Rofik: Ini Langgar UU No. 3 Tahun 2020

“Jika pemerintah memberikan relaksasi ke Freeport sama saja pemerintah melanggar Undang-Undang yang baru diterbitkan, yaitu UU No. 3 / 2020 Tentang Minerba. Karena itu kami sangat tidak setuju PT. Freeport menunda penyelesaian pembangunan smelter baru di Gresik, Jawa Timur menjadi 2024”

H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (27/08) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto, tidak setuju dengan dengan rancangan PT. Freeport Indonesia menunda penyelesaian pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) baru di Gresik, Jawa Timur menjadi 2024.

Hal ini disampaikan Rofik dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI bersama Dirjen Minerba KESDM RI & Presdir PT Freeport Indonesia, Kamis (27/08/2020).

Pemohonan penundaan ini disampaikan Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Jenpino Ngabdi.

Jenpino mengatakan pemohonan penundaan penyelesaian pembangunan smelter baru di Gresik ini dikarenakan terdampak dari adanya pandemi Covid-19. Pandemi ini menurutnya telah mengganggu finalisasi kontrak Engineering, Procurement and Construction (EPC). Pasalnya, kontraktor harus melakukan finalisasi biaya dan waktu

penyelesaian pembangunan. Namun karena adanya pembatasan mobilitas di negara asal kontraktor, sehingga ini menyulitkan mereka bekerja dengan efektif.

“Akibat dari dampak Covid-19, pencapaian progress masih di bawah target karena kontrak EPC belum bisa difinalisasi oleh EPC kontraktor kami,” Kata Jenpino

Menanggapi pemohonan penundaan penyelesaian pembangunan smelter baru di Gresik ini, Rofik mendesak Pemerintah untuk menolak pemohonan PT Freeport Indonesia yang ingin menunda penyelesaian pembangunan smelter dari target yang direncanakan operasional pada tahun 2023.

“Pemerintah jangan sampai melanggar UU Minerba yang usianya baru seumur jagung” Kata Rofik

“Jika pemerintah memberikan relaksasi ke Freeport sama saja pemerintah melanggar Undang-Undang yang baru diterbitkan, yaitu UU No. 3 / 2020 Tentang Minerba. Karena itu kami sangat tidak setuju PT.



Freeport menunda penyelesaian pembangunan smelter baru di Gresik, Jawa Timur menjadi 2024” Tambah Rofik.

Pembangunan smelter adalah amanah undang-undang. Ini merupakan kehendak masyarakat yang ingin sektor pertambangannya mampu menghasilkan produk bernilai tinggi yang akan memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemakmuran rakyat.

Rofik menegaskan bahwa proyek smelter bukan proyek rugi melainkan proyek yang menguntungkan bagi Indonesia, karena banyak multiplier effect yang akan dihasilkan.

“Bagi masyarakat bangsa

ini sangat menguntungkan, karena ada added value, lapangan kerja meniadakan ekspor barang mentah, ada keuntungan buat rakyat Indonesia. Tidak sepatutnya tidak setuju dengan relaksasi penundaan smelter sampai mundur,” Pungkas Rofik

Fraksi PKS meminta Pemerintah untuk konsisten serta bersikap tegas dan beribawa dalam menjalankan amanat UU Minerba yang baru ini sehingga cita-cita bangsa Indonesia dalam amanat konstitusi yaitu memajukan kesejahteraan umum dapat terwujud.

*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Aleg PKS Dorong Kemenag Totalitas atasi Kesulitan Mahasiswa saat Pandemi

“Seluruh elemen saat ini sangat membutuhkan bantuan sekecil apapun, termasuk para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu ditengah pandemi. Mereka dan keluarganya sudah pasti ikut terdampak, ada beberapa diantaranya yang orang tuanya meninggal karena Covid -19

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (28/08) — Kementerian Agama menerbitkan aturan untuk memberikan keringanan uang kuliah tunggal (UKT) bagi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Hal itu diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.

Anggota komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba lubis menyambut baik keluarnya

peraturan menteri tersebut.

Iskan juga berharap agar regulasi ditataran Perguruan tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dapat mempermudah dan segera merealisasikannya.

“Seluruh elemen saat ini sangat membutuhkan bantuan sekecil apapun, termasuk para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu ditengah pandemi. Mereka dan keluarganya sudah pasti ikut terdampak, ada beberapa diantaranya yang orang tuanya meninggal karena Covid -19,” ungkapnya.

Juga beberapa

diantaranya, lanjut iskan, yang menurun penghasilannya, di-PHK, usaha yang tutup dan bangkrut dan lain sebagainya.

“Sehingga, banyak diantara para mahasiswa yang terkendala dalam membayar uang kuliah tunggal (UKT) di kampusnya masing-masing.” Kata iskan

Sebagaimana hasil Rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Pendidikan Kemenag RI dan Rektor PTKIN se-Indonesia pada Selasa 25 Agustus 2020.

“Pada dasarnya kami mendukung Terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) no. 515 tahun 2020, tetapi dengan beberapa catatan pastinya. Terutama kami mendesak agar dirjen Pendidikan Kemenag RI bersama para rektor PTKIN se-Indonesia segera merumuskan dan mengimplementasikan pemberian keringanan UKT tersebut bagi para mahasiswa.” Ungkapnya

Selain itu, permasalahan terkait multitafsir atau multi-interpretasi dikalangan PTKIN segera diselesaikan.



“Kami ingin bantuan ini diberikan secara Adil, Dirjen Pendidikan Kemenag bisa segera berkoordinasi dengan Pemerintah terkait seperti Kemensos dan Kemendikbud agar bantuan Keringanan UKT ini tepat sasaran, jangan sampai ada sebagian mahasiswa yang didiskriminasi. kan bisa dilihat dari aspek yang tercantum dalam KMA tersebut pada nomor 4, terkait pihak yang diprioritaskan dalam objek pemberian keringanan UKT ini,” terang Iskan.

Hanya saja, lanjut Iskan, Pemerintah harus punya niat totalitas dalam membantu mahasiswa ditengah pandemi ini.

“Kalau anggarannya cukup, jangankan keringanan, kalau bisa penghapusan sementara biaya UKT bagi mahasiswa terdampak itu harus dilakukan. ingat, selain UKT,

pemerintah juga harus membantu para mahasiswa dalam mensubsidi pembelian kuota internet nya agar pembelajaran secara daring tetap terlaksana secara lancar,” tandas Iskan.

“Kami juga mendesak agar dirjen pendidikan kemenag RI dan para rektor PTKIN agar tetap meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh (daring) dengan melakukan kualitas metode pembelajaran juga bekerjasama dengan provider telekomunikasi dan IT yang kompeten serta meningkatkan pembinaan kepada para pegawai dan dosen di lingkungan PTKIN, jika perlu berikan sanksi tegas kepada para pegawai dan dosen yang lalai dalam menjalankan tugasnya, agar mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran daring ini secara efektif dan efisien,” tambah Iskan.

Aleg PKS Tegaskan Pemerintah Jangan PHP Soal Obat dan Vaksin Covid-19

Sampaikan setiap tahapan sudah berjalan sejauh mana dari sisi penelitian. Ini sekaligus mendidik masyarakat agar mendapatkan informasi yang jelas dan terukur, tidak bombastis hanya demi sesuatu yang tidak substantif dalam perang melawan Covid-19,

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (27/08) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta Pemerintah jangan PHP terkait klaim produksi obat dan vaksin Covid-19 di dalam negeri.

Hal ini menanggapi ramai tentang klaim obat Covid-19, serta pernyataan Presiden yang janji akan memproduksi 30 juta vaksin hingga akhir tahun 2020 dan 290 juta vaksin hingga 2021.

Mufida menegaskan setiap komponen pemerintah adalah sumber utama dan resmi yang bakal diikuti oleh masyarakat terkait penanggulangan Covid-19.

Mufida mengingatkan agar

Rakyat tidak dibuat bingung dan diberikan janji yang belum jelas tentang Obat dan Vaksin Covid 19. Rakyat sudah banyak dikorbankan selama ini, jangan merugikan rakyat. Bicara obat dan vaksin sama dengan bicara kesehatan dan keselamatan nyawa rakyat.

Ia mengkhawatirkan klaim-klaim dari berbagai sumber resmi pemerintahan akan berdampak pada dua hal. Pertama, masyarakat terlanjur memiliki kepercayaan tinggi dan abai terhadap kaidah ilmiah. Kedua, muncul sikap skeptis sebab klaim dari pemerintah tidak terbukti.

"Klaim obat Covid-19,

produksi vaksin hingga 30 juta sampai akhir tahun 2020 dan membuka peluang ekspor vaksin tahun depan, setelah sebelumnya kalung anti corona ini harus hati-hati dikeluarkan oleh organ resmi pemerintah," kata Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/8/2020).

Mufida mendukung setiap upaya penelitian untuk produksi vaksin termasuk obat untuk mengobati penderita Covid-19. Tetapi, hingga benar-benar teruji secara klinis dan ilmiah, jangan sampai disebutkan ke publik sebagai obat dan vaksin yang pasti bisa mengatasi persoalan Covid-19.

"Kita dukung setiap tahap pengujian obat dan vaksin. Yang perlu disampaikan adalah transparansi dan akuntabilitas dalam setiap fase. Sampaikan setiap tahapan sudah berjalan sejauh mana dari sisi penelitian. Ini sekaligus mendidik masyarakat agar mendapatkan informasi yang jelas dan terukur, tidak bombastis hanya demi sesuatu yang tidak substantif dalam perang melawan Covid-19," kata Mufida.

Mufida mengingatkan,



sudah banyak kegaduhan-kegaduhan terkait penanganan Covid-19 muncul justru dari pemerintah. Se jauh ini yang berkuasa atas data-data resmi terkait penanganan Covid-19 adalah pemerintah. Sehingga publik mau tidak mau selalu menantikan informasi terbaru terkait penanganan Covid-19 dari sumber pemerintahan.

"Jadi jangan salahgunakan kepercayaan itu dengan

memberikan informasi yang bersifat hiperbola. Sampaikan saja sesuai fakta dan sejauh mana. Jika ada kemajuan sampaikan apa saja kemajuannya. Jika masih jalan di tempat sampaikan apa adanya. Dengan kejujuran tersebut, saya yakin rakyat justru akan berada di belakang pemerintah untuk mendukung, bukan sebaliknya," kata dia.

Banyak Dokter Gugur Akibat Covid-19

Aleg PKS: Pemerintah Harus Prioritaskan Perlindungannya

“Jumlah dokter kita kurang dari 200 ribu orang, masih belum sepadan dengan jumlah penduduk. Jika kebijakan perlindungan terhadap dokter tidak efektif, bukan tidak mungkin kita akan mengalami krisis dokter dan tenaga medis

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (20/08) — Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merilis 80 nama dokter yang meninggal dunia akibat Covid-19. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher meminta Pemerintah untuk memprioritaskan perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan.

“Tenaga medis harus terlindungi dengan aman dalam menjalankan tugas di masa pandemi. Sebab mereka bekerja di zona yang rentan penularan. Kita tidak ingin ada tenaga medis yang terpapar atau gugur akibat prosedur penanganan Covid-19 yang kurang standar,” kata Netty dalam keterangan media, Kamis (20/08).

Netty mengatakan, jika perlindungan terhadap tenaga

medis tidak diprioritaskan, maka kita akan mengalami kerugian besar di masa depan.

“Jumlah dokter kita kurang dari 200 ribu orang, masih belum sepadan dengan jumlah penduduk. Jika kebijakan perlindungan terhadap dokter tidak efektif, bukan tidak mungkin kita akan mengalami krisis dokter dan tenaga medis,” katanya

Ini sejalan dengan apa yang disampaikan Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengungkapkan jumlah dokter paru di Indonesia, yakni 1.976 orang. Dengan jumlah tersebut, kata dia, satu dokter paru harus melayani sekitar 245 ribu warga.

“Semua pihak harus

terlibat melindungi dokter dan tenaga medis sebagai aset bangsa yang berharga. Diawali dengan disiplin semua orang dalam menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak fisik,” kata Netty.

Terakhir, Netty meminta agar pemerintah membuat kebijakan perlindungan terhadap tenaga medis dan nakes.

“Dan ditindaklanjuti dengan implementasi kongkret di lapangan, seperti kepastian tersedianya alat pelindung diri yang standar dan layak di setiap tingkat pelayanan kesehatan,” tandasnya.





PERSEMBAHAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Webinar **MENAKAR NASIB** Sistem Pendidikan Nasional di Tengah Belitan Omnibus Law



KEYNOTE SPEECH

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



NARASUMBER

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM
Wakil Ketua Komisi X DPR RI
"Untung Rugi Sisdiknas dalam Omnibuslaw"



Darmaningtyas
Pemerhati Pendidikan
"Implikasi RUU Cipta Kerja pada Sistem Pendidikan Nasional"



Drs. Harianto Oghie, MA
Sekretaris LP Ma'arif NU PBNU
"Nasib Pendidikan Dasar, Menengah dalam RUU Cipta Kerja"



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, M.Hum
Dekan Fakultas Hukum UMS
"



MODERATOR

Agus Widiarto, S.S. MPA
Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI

SENIN

31 Agustus 2020
pk. 13.00 s.d 15.00 WIB



Live Virtual:
Facebook dan Youtube
Fraksi PKS DPR RI

Tak Elok

Cetak Uang untuk Souvenir
saat Kondisi Ekonomi Sulit



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Secara umum orang tidak akan membelanjakan uang tersebut atau hanya akan disimpan sebagai koleksi saja. Karena walaupun dapat menjadi alat pembayaran, uang rupiah edisi Kemerdekaan ke-75 tahun RI ini dicetak 'terbatas', yakni hanya 75 juta lembar. Sehingga orang akan cenderung menyimpannya atau menjadikannya sebagai koleksi. Disinilah letak ketidakelokannya

Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.
Anggota Komisi XI DPR RI



Legislator PKS: Tak Elok Cetak Uang untuk Souvenir saat Kondisi Ekonomi Sulit

Secara umum orang tidak akan membelanjakan uang tersebut atau hanya akan disimpan sebagai koleksi saja. Karena walaupun dapat menjadi alat pembayaran, uang rupiah edisi Kemerdekaan ke-75 tahun RI ini dicetak 'terbatas', yakni hanya 75 juta lembar. Sehingga orang akan cenderung menyimpannya atau menjadikannya sebagai koleksi. Disinilah letak ketidakekelokannya

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (21/08) — Bank Indonesia (BI) pada Senin, (17/8/2020) lalu, merilis uang baru pecahan senilai Rp 75.000. Namun, uang khusus edisi Kemerdekaan RI ke-75 ini dikabarkan bukan berfungsi sebagai alat tukar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, uang khusus yang diterbitkan ini bukanlah uang baru yang

digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi.

"Uang ini khusus untuk peringatan peristiwa, yakni dalam rangka memperingati HUT RI ke-75," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual (17/08/2020).

Menanggapi dirilisnya uang 75.000 baru ini, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan bahwa di saat

sedang pandemik dimana ekonomi masyarakat sedang tidak baik, keluarnya uang baru menjadi kurang elok.

"Karena orang tertarik merogoh kocek 75 ribu hanya untuk satu lembar souvenir. Sementara situasi kita sedang sulit," katanya.

Anis menilai, walaupun uang rupiah khusus ini dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi biasanya tidak digunakan sebagai alat tukar.

Menurutnya, secara umum orang tidak akan membelanjakan uang tersebut atau hanya akan disimpan sebagai koleksi saja.

"Karena walaupun dapat menjadi alat pembayaran, uang rupiah edisi Kemerdekaan ke-75 tahun RI ini dicetak 'terbatas', yakni hanya 75 juta lembar. Sehingga orang akan cenderung menyimpannya atau menjadikannya sebagai koleksi. Disinilah letak ketidakekelokannya," ujar Anis.

Ketika seharusnya masyarakat umum bisa membelanja-



kan uang itu untuk hal yang lain, mereka malah menyimpannya hanya demi koleksi, sementara kondisi ekonomi kita sedang kurang baik.

Pada hal 75 juta lembar uang yang dicetak itu, akan menjadi nilai yang luar biasa jika semua dibeli oleh masyarakat. "Berpotensi jadi fresh money untuk negara, dan ditarik dari uang rakyat" tegasnya.

Jika dicoba untuk dihitung, 75 juta lembar dikalikan dengan 75 ribu rupiah, maka akan terkumpul uang sebesar Rp 7,5 triliun. "Jumlah yang luar biasa, dan itu murni berasal dari uang rakyat" ungkapnya menekankan.

Kemudian, politisi perempuan PKS ini mengingatkan kembali bahwa kita sedang dalam kondisi pandemik yang berdampak ke semua sektor ekonomi.

Akan sangat tidak pantas jika saat negara ingin meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi masyarakat malah harus menyetor Rp 75.000 hanya untuk uang khusus 'souvenir'. Sesuatu yang memiliki niat baik, tetapi dilaksanakan di saat yang tidak tepat.

"Dikhawatirkan malah akan menimbulkan polemik panjang," pungkasnya mengakhiri.

Evaluasi Laporan Keuangan Menkeu 2019

Tunjangan Guru Jadi Catatan Kritis Anggota FPKS

jika Pemerintah belum bisa memberikan kesejahteraan atau memperbaiki status guru, paling tidak diupayakan agar nilai dana tunjagannya tidak diturunkan

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (27/08) — Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan tentang Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada APBN tahun 2019, Rabu 26 Agustus 2020, Legislator PKS, Anis Byarwati menyampaikan pandangan kritisnya terhadap beberapa poin anggaran.

Hal pertama yang dikritisi Anis mengenai dana tunjangan guru. Anis mengutip data dari Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) 2019, yang menyebutkan bahwa hingga 31 Desember 2019 terdapat penurunan dana tunjangan guru sebanyak 5,04% dibanding dengan tahun 2018 dan dana tambahan penghasilan/tamsil guru yang penyalu-

rannya turun sampai 21,09%.

Menurut Anis, jika Pemerintah belum bisa memberikan kesejahteraan atau memperbaiki status guru, paling tidak diupayakan agar nilai dana tunjagannya tidak diturunkan.

"Kita tahu bahwa guru memiliki peran yang sangat penting di dalam pendidikan di Indonesia. Karenanya kesejahteraan mereka harus benar-benar diperhatikan oleh Pemerintah," himbau Anis.

Yang kedua, legislator dari dapil Jakarta Timur ini mengemukakan data Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp 212,7 Triliun dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 175,2 Triliun yang berarti terjadi peningkatan 21,4 persen atau

Rp 37,5 triliun SAL dari tahun 2018 sampai 2019.

Padahal jika dilihat per 31 Desember 2019 Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri sebesar Rp 667,8 triliun dan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri sebesar dan Rp3.966,4 triliun. Sementara per 31 Desember 2018 Utang Jangka Panjang Luar Negeri sebesar Rp 714,4 triliun dan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri sebesar Rp 3.451,7 triliun. Terjadi peningkatan jumlah utang Jangka Panjang DN sebesar Rp514,7 triliun.

Menurut Anis, data ini memberikan indikasi tidak efektifnya penggunaan dana APBN.

"Bagaimana penjelasan Pemerintah mengenai SAL BUN yang mencapai Rp37,5 triliun ini?" tanyanya.

Hal ketiga mengenai realisasi anggaran BUN. Anis mengutip data dari Laporan Realisasi Anggaran BUN yang menyebutkan bahwa realisasi penerimaan Negara bukan pajak mencapai 115,69 persen, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai 115,69



persen dan Pendapatan negara dan Hibah BUN mencapai 115,27 persen.

Sedangkan Belanja Negara BUN mencapai 94,76 persen sehingga SIKPA sebelum Pendapatan dan Belanja K/L mencapai 78,35 persen.

Anis mempertanyakan, "Apa kendala pemerintah terkait dengan Belanja Negara BUN dan Belanja Pemerintah Pusat

yang realisasinya di bawah 95 persen? "

Tidak lupa, Anis memberikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan atas prestasinya mendapatkan WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2015 sampai 2019. Harapan Anis, Kemenkeu dapat terus mempertahankan prestasinya ini.



OJK Diminta Ambil Langkah Serius dalam Penyelamatan Industri Asuransi

Perlu langkah kongkrit dan serius dari OJK untuk menyelesaikan masalah ini, misalnya dengan menyusun peraturan untuk memberikan efek jera kepada pelaku industri yang cenderung melampaui batas, sehingga berpotensi merugikan nasabah

Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (25/08) — Akhir-akhir ini industri asuransi di Indonesia kembali mengalami goncangan dengan pelbagai ancaman gagal bayar yang melibatkan perusahaan asuransi besar seperti Kresna Life, AJB Bumiputera, hingga Jiwasraya. Kasus gagal bayar ini membuat nasabah dirugikan dan tidak bisa mengambil haknya.

Semua kasus ini disinyalir karena beberapa alasan, diantaranya kesalahan pengelolaan manajemen, likuiditas yang dialami akibat pandemi covid-19, hingga pengawasan yang dilakukan oleh OJK.

Menanggapi hal itu, Junaidi Auly, selaku Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menempuh langkah yang kongkrit dalam mengatasi masalah gagal bayar di industri asuransi.

"Perlu langkah kongkrit dan serius dari OJK untuk menyelesaikan masalah ini, misalnya dengan menyusun peraturan untuk memberikan efek jera kepada pelaku industri yang cenderung melampaui batas, sehingga berpotensi merugikan nasabah" ujar Junaidi di Jakarta, Selasa, (25/8/2020).

Anggota Fraksi PKS ini melanjutkan, OJK sebagai regulator juga harus memperketat pengawasan karena selama ini ada regulatory supervisory gap, yakni gap antara peraturan yang demikian ketat tetapi pengawasannya lemah.

"Jika tidak ada perbaikan dalam hal pengawasan, dikhawatirkan kasus serupa akan terulang kembali yang akibatnya nasabah dirugikan dan masyarakat tidak akan percaya lagi dengan asuransi," pungkasnya.

Legislator asal Lampung ini juga menekankan kepada perusahaan asuransi agar bertindak profesional dalam mengelola dana nasabah. Ketidakmampuan bayar klaim nasabah jadi pertanda adanya salah urus dalam manajemen perusahaan.

Junaidy juga mendesak kepada perusahaan asuransi yang bermasalah untuk terbuka dan transparan dalam menyampaikan informasi kepada nasabah terutama keterbukaan kondisi keuangan perusahaan.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Beban Hutang yang Melampaui
rekomendasi IMF dan ISSAI 5411

Negara Bisa Bangkrut

“

Ratio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara dalam RAPBN 2021 mencapai 21% naik dari tahun ini yang mencapai sebesar 20%. Ini sudah bukan melampaui batas aman lagi, tapi sudah naik 100% dan harus diwaspadai. Jangan sampai kita makin terlilit hutang dan tidak bisa membayar, apalagi sampai meninggalkan negara yang bankrut untuk anak cucu

Ir. H. Sigit Sosiantomo

Anggota Badan Anggaran DPR RI



Terkait RAPBN 2021

Anggota Banggar : Negara Bisa Bangkrut Jika Beban Bunga Utang Terus Naik

Beban bunga hutang yang harus dibayar pemerintah pada 2021 tersebut sudah melampaui rekomendasi IMF dalam International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411.

Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Badan Anggaran DPR RI

Surabaya (19/08) — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosianto mengingatkan bahaya beban bunga hutang RI yang sudah melampaui batas aman IMF.

Jika tidak hati-hati, kata Sigit, utang yang besar akan melampaui rasio yang aman akan semakin membebani APBN bahkan bisa menyebabkan negara dianggap bangkrut akibat default (gagal bayar).

"Beban bunga utang yang perlu ditanggung oleh pemerintah pada 2021 mendarang mencapai Rp373,3 triliun atau naik 10,2% dari

outlook beban bunga utang 2020 sebesar Rp338,8 triliun. Kontribusi pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara mencapai 21% atau lebih tinggi ketimbang tahun 2020. Ini harus diwaspadai. Jika tidak hati-hati negara bisa bangkrut karena beban bunga hutang sangat tinggi," kata Sigit.

Sigit mengatakan beban bunga hutang yang harus dibayar pemerintah pada 2021 tersebut sudah melampaui rekomendasi IMF dalam International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411.

Rasio bunga utang terhadap penerimaan yang oleh IMF dibatasi pada 7 persen hingga 10 persen telah dilampaui oleh pemerintah sejak 2015 di mana rasio bunga utang terhadap penerimaan mencapai 10,35 persen.

"Ratio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara dalam RAPBN 2021 mencapai 21% naik dari tahun ini yang mencapai sebesar 20%. Ini sudah bukan melampaui batas aman lagi, tapi sudah naik 100% dan harus diwaspadai. Jangan sampai kita makin terليل hutang dan tidak bisa membayar, apalagi sampai meninggalkan negara yang bangkrut untuk anak cucu," Kata Sigit.

Sebelumnya, Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2019, BPK juga sudah mengingatkan pemerintah mengenai kerentanan utang pemerintah telah melampaui rekomendasi IMF dalam International



Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411.

Berdasarkan Laporan Hasil Reviu atas Kesenambungan Fiskal yang dikeluarkan BPK belum lama ini, menyebutkan rasio debt service terhadap penerimaan, rasio bunga utang terhadap penerimaan, dan rasio utang terhadap penerimaan telah melampaui batas aman IMF.

Rinciannya, pada 2018 rasio debt service terhadap penerimaan mencapai 39,06 persen, sedangkan IMF mematok batas aman di nominal 25 persen hingga 35 persen.

Rasio bunga utang

terhadap penerimaan yang oleh IMF dibatasi pada 7 persen hingga 10 persen telah dilampaui oleh pemerintah sejak 2015 di mana rasio bunga utang terhadap penerimaan mencapai 10,35 persen.

Sementara rasio utang terhadap penerimaan yang oleh IMF dibatasi pada 90 persen hingga 150 persen sudah dilampaui oleh pemerintah sejak 2013 di mana rasio tersebut mencapai 165,09 persen.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Fraksi PKS (FPKS) memandang rencana penurunan Anggaran TKDD ini harus menjadi catatan tersendiri untuk dicermati ulang dalam pembahasan RAPBN 2021

**Dr. HERMANTO,
S.E., M.M**

Anggota Badan Anggaran DPR RI

BANGGAR

fraksi.pks.id | Kamis 27 Agustus 2020

f Fraksi PKS DPR RI

fraksipksdprri

@fpksdprri

fraksi.pks.id



Fraksi PKS Kaji Usulan Pemerintah yang akan Mengurangi Anggaran Untuk Daerah

Jakarta (27/08) — Anggota Badan Anggaran DPR RI Hermanto mengungkapkan, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp. 796,3 triliun. Dengan anggaran sebesar itu maka terjadi penurunan alokasi karena tren transfer ke daerah dan dana desa sebelumnya selalu meningkat.

"Fraksi PKS (FPKS) memandang rencana penurunan Anggaran TKDD ini harus menjadi catatan tersendiri untuk dicermati ulang dalam pembahasan RAPBN 2021", tandas Hermanto.

Lebih jauh, Hermanto menyebutkan, rencana anggaran TKDD 2021 sebesar Rp. 796,3 triliun itu terdiri dari dana transfer daerah Rp. 724,3 triliun dan dana desa Rp. 72 triliun. Alokasi anggaran tersebut tidak mengikuti tren kenaikan TKDD.

"TKDD tahun 2018 Rp.

766,2 triliun, tahun 2019 Rp. 826,77 triliun, tahun 2020 Rp. 856,95 triliun. Dari angka-angka tersebut terlihat TKDD tahun-tahun sebelumnya trennya meningkat", ujarnya.

Kebijakan alokasi anggaran melalui TKDD, lanjutnya, harus secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program prioritas pemerintah seperti: pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan pertahanan keamanan.

"Penyaluran TKDD harus diarahkan menjadi berbasis kinerja seperti DAK Fisik dan Dana Desa yang bersifat investasi dan berkontribusi langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat sampai ke level terendah", papar Hermanto.

"Dengan demikian TKDD diharapkan mampu menstimulus peningkatan kemandirian fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat", pungkas legislator dari dapil Sumbang I ini.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dirgahayu
**Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
ke-75**

29 Agustus 1945 - 29 Agustus 2020

*Semoga semakin aspiratif
Menjunjung tinggi kepentingan
Bangsa dan Warga negara*

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



Ledia Hanifa: Omnibus Law Ciptaker Jangan Tinggalkan Penyandang Disabilitas

“Semua ketentuan prasyarat teknis yang ada dalam Undang-Undang eksisting No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan yang diamanahkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas harus tertera secara jelas, lengkap, rinci.

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (28/08) — Dalam rapat pembahasan RUU Cipta Kerja yang memasuki soal perizinan bangunan gedung berbagai ketentuan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dihapus.

Termasuk menghapus pasal 27 dan pasal 31 UU No 28 Tahun 2002 yang secara khusus memberikan kewajiban aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah segera mengingatkan komitmen

perlindungan Pemerintah kepada para Penyandang Disabilitas.

“Dalam Undang-Undang no 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas diantaranya dengan menyediakan sarana prasarana termasuk bangunan gedung yang ramah disabilitas. Ketika amanah dalam undang-undang ini mewajibkan aksesibilitas tetapi dalam omnibus law hal ini malah dihapuskan kami sangat khawatir hal ini bisa menghambat upaya perwujudan keseta-

raan hak bagi para penyandang disabilitas.” Kata mantan Ketua Panja RUU Disabilitas tahun 2014 ini.

Pasal 25 dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja memang mengubah beberapa ketentuan terkait prasyarat mendapat izin dan sertifikat laik fungsi sebelum mendirikan bangunan dan gedung, termasuk diantaranya menghapus pasal 27 dan pasal 31 UU No 28 Tahun 2002 yang secara khusus memberikan kewajiban aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia. Semua ketentuan berupa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) ini kemudian dijanjikan akan dimuat di dalam Peraturan Pemerintah. Bahkan berbagai proses ini akan dipercepat pula lewat jalan kemudahan pengurusan secara online.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Fraksi PKS ini kembali mengingatkan. “Dengan adanya ketentuan definitif dalam undang-undang saja kita masih sering



menemukan kelolosan banyak bangunan yang tidak sesuai prasyarat UU No 28 Tahun 2002. Apalagi kalau tidak tertera di dalam undang-undang, tentu semakin tidak ada rasa keharusan memenuhi ketentuan sebelum mengajukan permohonan perizinan dan sertifikat laik fungsi ini.”

Ledia kemudian memberi contoh langsung pada Gedung DPR/MPR RI. “Gedung DPR ini misalnya, saat kami membahas Undang-Undang no 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, saat itu sekitar tahun 2015, saya tanyakan, apakah Gedung DPR ini memiliki sertifikat laik fungsi? Dijawab secara tegas oleh

orang PU ada, tetapi pada kenyataannya Gedung DPR RI ini kan tidak ramah disabilitas, juga lansia. Bahkan toilet yang ada tidak bisa dimasuki pengguna kursi roda. Jadi dimana letak laik fungsinya sementara ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat aksesibilitas yang padahal tercantum dalam undang-undang? Sampai akhirnya baru dalam satu dua tahun terakhir mulai direnovasi, dibuat sarana-sarana yang akan mengakomodir aksesibilitas tersebut, dibuat ramp dan saat ini tengah dibuat eskalator.”

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Legislator PKS Peringatkan RUU Omnibus Law Bukan Solusi Krisis

penyebab rendahnya investasi di Indonesia bukan disebabkan karena masalah perizinan saja, akan tetapi penghambat investasi di Indonesiat adalah masalah korupsi dan ketidakpastian hukum yang melingkupinya sebagaimana yang disampaikan World Economic Forum.

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (23/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menjadi narasumber pada Webinar yang diadakan oleh LSM Ruang Publik Riau tentang Fresh Graduate Tidak Memiliki Lapangan Pekerjaan, Jumat, (21/08/2020).

Dalam kesempatan ini, selain berdiskusi tentang lapangan kerja, peserta juga bertanya tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja (RUU OL Cipta-kerja) yang sedang dibahas DPR.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Anis menyatakan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja

tidak akan menjadi solusi dari krisis yang disebabkan pandemi Covid 19.

Anis menjelaskan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang diajukan oleh Pemerintah ini, pada dasarnya adalah untuk meningkatkan investasi dengan cara memberikan kemudahan dalam perizinan.

"Jika Pemerintah ingin meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), maka Pemerintah harus meningkatkan konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor-impor dan belanja pemerintah untuk menyejahterakan rakyat," terang Anis.

Dari keempat variabel tersebut, lanjut Anis, kontribusi terbesar adalah konsumsi rumah tangga sebesar 56-60%.

"Jika tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, caranya adalah dengan meningkatkan konsumsi masyarakat. Harus ada upaya meningkatkan daya beli masyarakat," tegas Anis.

Adapun cara untuk meningkatkan daya beli masyarakat, menurut Anis, tidak cukup hanya dengan memberikan BLT (Bantuan langsung Tunai) dan Bansos saja.

"Harus ada aksi penurunan harga-harga kebutuhan pokok," ungkapnya.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok malah mengalami peningkatan. Ditambah melonjaknya tarif listrik, naiknya harga gas 3 kg serta naiknya iuran BPJS, menjadi beban tersendiri itu rakyat.

Sementara itu, Anis menilai penyebab rendahnya investasi di Indonesia bukan disebabkan karena masalah



perizinan saja, akan tetapi penghambat investasi di Indonesiat adalah masalah korupsi dan ketidakpastian hukum yang melingkupinya sebagaimana yang disampaikan World Economic Forum.

Riset WEF menunjukkan terdapat 16 faktor yang menjadi penghalang iklim investasi di Indonesia, dan korupsi menjadi kendala utama. Indonesia saat ini berada di urutan ke-85 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) 2019 yang dirilis Transparency International Indonesia (TII).

Anis yang juga anggota Panja Omnibus Law Cipta Kerja di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI juga memaparkan bahwa proses pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini cukup berat dan memakan waktu lama.

Draft RUU ini terdiri dari 79

Undang-undang yang akan dirombak dengan 1.244 pasal yang ada didalamnya. RUU ini menetapkan undang-undang diatas menjadi menjadi 15 bab dan 174 pasal yang menyasar 11 klastar.

"DPR RI harus membahas draft RUU setebal 1.028 halaman," tuturnya.

Mengakhiri pembicaraannya di acara webinar ini, Anis berpesan agar fresh graduate terus meningkatkan kompetensi baik dari sisi keilmuan, hard skill dan soft skill.

"Karena mereka akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Selain bersaing dengan pencari kerja sesama angkatan, mereka juga harus bersaing dengan 15 juta korban PHK dampak pandemik yang secara porto folio sudah memiliki pengalaman kerja", tutup Anis.

Wakil Ketua FPKS: RUU Cipta Kerja Hapus Peran DPR dalam Penentuan Tarif Listrik

Melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini terjadi sentralisasi penyelenggaraan ketenagalistrikan. Soal tarif listrik, soal RUKN serta soal penyelenggaraan ketenagalistrikan seluruhnya dipusatkan pada Pemerintah Pusat tanpa mengikutsertakan Dewan Perwakilan Rakyat maupun Pemerintah Daerah

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (20/8) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, kritik isi RUU Cipta Kerja yang menghilangkan peran DPR dalam penentuan besaran tarif dasar listrik (TDL) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

Sebelumnya dalam Pasal 34, UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan disebutkan, bahwa Pemerintah berwenang menetapkan TDL setelah disetujui DPR. Begitu juga dalam hal penentuan RUKN,

Pemerintah dapat menetapkan RUKN setelah berkonsultasi dengan DPR.

Tapi dalam RUU Cipta Kerja atau yang sering disebut sebagai RUU Omnibus Law, ketentuan persetujuan DPR itu dihapus. Pemerintah diberi kewenangan penuh menetapkan TDL secara berbeda di setiap wilayah, serta menetapkan RUKN tanpa persetujuan atau konsultasi dengan DPR.

"PKS menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah

mencabut otoritas rakyat atas listrik, khususnya dalam hal penentuan tarif. Menurut RUU ini, bila kelak disahkan, seratus proses terkait tarif listrik, akan ditentukan oleh Pemerintah Pusat," jelas Mulyanto.

Hal lain yang disorot Mulyanto dari RUU Omnibus Law ini adalah dicabutnya peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan listrik daerah. Semua akan diatur Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah dan DPRD tidak lagi berwenang menentukan TDL dan rencana kerja usaha ketenagalistrikan daerah.

"Melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini terjadi sentralisasi penyelenggaraan ketenagalistrikan. Soal tarif listrik, soal RUKN serta soal penyelenggaraan ketenagalistrikan seluruhnya dipusatkan pada Pemerintah Pusat tanpa mengikutsertakan Dewan Perwakilan Rakyat maupun Pemerintah Daerah," papar Mulyanto.

Pemusatan kekuasaan keliriktan di tangan Pemerintah pusat seperti ini,



kata Mulyanto, betul-betul akan menutup katup demokratisasi soal keliriktan. Padahal demokratisasi mensyaratkan proses chek and balances dan otonomi antar unsur eksekutif, legislatif dan daerah.

"Prinsip demokrasi dan desentralisasi adalah berbagi kekuasaan, mengangap spent of control (rentang kendali) Indonesia, baik secara sektoral maupun teritorial, yang demikian luas dari Sabang hingga Merauke," lanjut Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan juga menilai ada kecenderungan TDL akan terus merangkak naik.

"Karena kontribusi Independent Power Producer (IPP) atau perusahaan pembangkit listrik swasta yang semakin

dominan. Belum lagi adanya klausul TOP (take or pay) dari IPP. Dimana dipakai atau tidak stroom harus dibayar PLN sesuai kontrak", ungkapnya.

Saat ini, imbuh Mulyanto, ketika permintaan listrik merosot, karena skema TOP, PLN tetap harus membayar listrik yang tidak dipakainya. Harga dan volume tidak pernah turun, meski eksek kelebihan listrik tersebut tidak digunakan PLN.

Tak ada berbagi derita di masa pandemi Covid-19 ini dari IPP. Seluruh beban ditanggung PLN, yang ujung-ujung harga jual listrik tersebut dibebankan kepada rakyat atau disubsidi Negara.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

EXIT



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PKS: Arahkan Anggaran Ke Sektor Prioritas!

"Menurut kami, Pemerintah juga perlu meningkatkan pemberian insentif dan subsidi pertanian secara memadai, seperti subsidi benih, subsidi pupuk, asuransi pertanian, jaminan pembelian, dan lain sebagainya. Pemerintah harus serius merealisasikan kebijakan agraria yang lebih berkeadilan. Demikian juga program-program kesejahteraan dan perlindungan nelayan perlu ditingkatkan

Dr. Hermanto, S.E., M.M.
Anggota Badan Anggaran DPR RI

PKS: Arahkan Anggaran Ke Sektor Prioritas!

“Menurut kami, Pemerintah juga perlu meningkatkan pemberian insentif dan subsidi pertanian secara memadai, seperti subsidi benih, subsidi pupuk, asuransi pertanian, jaminan pembelian, dan lain sebagainya. Pemerintah harus serius merealisasikan kebijakan agraria yang lebih berkeadilan. Demikian juga program-program kesejahteraan dan perlindungan nelayan perlu ditingkatkan

Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Badan Anggaran DPR RI

Fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan anggaran kepada sektor prioritas. Fraksi PKS berpendapat bahwa Pemerintah perlu memperketat kegiatan seperti paket-paket rapat, belanja perjalanan maupun perjalanan dinas dalam maupun luar negeri. Pertumbuhan belanja perjalanan dinas dalam negeri juga sangat besar, dimana pada periode 2013-2019 mengalami pertumbuhan yang mencapai 13,6 persen.

“Ini sangat tidak produktif,

pemerintah perlu mengarahkannya ke sektor yang lebih prioritas” ujar Hermanto saat menyampaikan Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Selasa (28/5) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Sebagai contoh, pemerintah perlu mengoptimalkan kembali anggaran pada sektor pendidikan. Fraksi PKS mencatat Belanja Pendidikan dalam RAPBN tahun 2021 sebesar Rp190.02 triliun, terjadi peningkatan jika

dibandingkan dengan outlook 2020 sebanyak 33,4 persen atau Rp142,4 triliun. Proporsi Anggaran Pendidikan sebesar 9,74 persen dari total belanja Pemerintah Pusat Rp1.951.3 triliun. Namun, hal ini harus diiringi dengan memperbaiki indikator-indikator kinerja pendidikan seperti HCI (Human Capital Index), kompetensi guru, dan ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah.

Di sisi lain, pemerintah juga harus memperkuat anggaran kesehatan terutama saat pandemi covid-19 maupun setelahnya. “ Kami mencatat bahwa Pemerintah pada RAPBN 2021 memberikan alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp169,7 triliun lebih rendah 20,1 persen jika dibandingkan dengan outlook APBN 2020 sebesar Rp212,5 triliun” ungkap Hermanto.

Hal yang sama juga berlaku pada anggaran bantuan sosial dimana Belanja Bantuan Sosial dalam Belanja Pemerintah Pusat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan outlook APBN 2020 Rp174,52 triliun dan RAPBN 2021 sebesar Rp161,4 triliun. Khusus untuk bantuan sosial,



pemerintah harus memperbaiki tata kelolanya, terutama terkait data. “Kami mendorong agar Pemerintah dalam pelaksanaan belanja bantuan sosial berbasis data yang akurat dan disertai dengan tata kelola yang memadai agar tidak terjadi penyalahgunaan” ujar Hermanto.

Pertanian dan kedaulatan pangan juga harus menjadi prioritas pemerintah. Pasalnya, ketersediaan, kecukupan maupun kenaikan harga pangan dapat berimbas ke daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan insentif di bidang

pertanian sekaligus merealisasikan kebijakan agraria dan tata kelola lahan yang berkeadilan.

“Menurut kami, Pemerintah juga perlu meningkatkan pemberian insentif dan subsidi pertanian secara memadai, seperti subsidi benih, subsidi pupuk, asuransi pertanian, jaminan pembelian, dan lain sebagainya. Pemerintah harus serius merealisasikan kebijakan agraria yang lebih berkeadilan. Demikian juga program-program kesejahteraan dan perlindungan nelayan perlu ditingkatkan” ujar Hermanto.

PKS: Jangan Lupakan Kesejahteraan Guru Honorer

Dengan kondisi Covid sekarang ini, ada problem yang cukup besar. Yaitu ada segmen yang tidak dihitung sama sekali. Artinya tidak masuk pada kartu pra kerja, tidak masuk juga pada program belanja sosial lainnya, tidak masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu adalah guru-guru honorer. Oleh karenanya kedepan dalam pembahasan APBN 2021, saya pikir ini salah satu yang sangat penting, jika kita belum bisa menyelesaikan status mereka, tetapi jangan sampai kesejahteraan mereka kita lupakan

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI

Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan, ada hal yang seringkali luput ketika membahas belanja bantuan sosial, yaitu guru honorer. Karena selama ini ketika berbicara terkait belanja bantuan sosial, data yang diambil selalu berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga nasib guru honorer

seringkali terabaikan.

“Dengan kondisi Covid sekarang ini, ada problem yang cukup besar. Yaitu ada segmen yang tidak dihitung sama sekali. Artinya tidak masuk pada kartu pra kerja, tidak masuk juga pada program belanja sosial lainnya, tidak masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu adalah guru-guru

honorer,” terang Ledia dalam interupsinya di Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Politisi Fraksi PKS ini membandingkan nasib guru honorer dengan pegawai swasta. Dimana, Pemerintah baru-baru ini menyatakan akan memberikan bantuan sebesar Rp 600 ribu bagi pegawai swasta yang berpenghasilan dibawah Rp 5 juta. Bantuan seperti ini tidak dirasakan oleh para guru honorer yang berperan aktif mencerdaskan anak bangsa.

Kedepan, Anggota Komisi X DPR RI ini meminta agar dalam pembahasan APBN 2021 nanti, baik Pemerintah maupun DPR tidak melupakan kesejahteraan guru honorer yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di penjuru negeri, baik itu di instansi pemerintah maupun di instansi swasta.

“Oleh karenanya kedepan dalam pembahasan APBN 2021, saya pikir ini salah satu yang sangat penting, jika kita belum bisa menyelesaikan status mereka, tetapi jangan sampai kesejahteraan mereka kita lupakan,” pungkasnya. (es)



Saya mendorong Pemerintah merubah nelayan kecil kita menjadi besar secara merata di Indonesia. Perimbangan perbandingan jumlah nelayan kecil dan nelayan besar yang sangat timpang mesti di geser. Ini salah satu langkah memajukan industri perikanan tangkap negara kita berbasis kerakyatan

Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P.,M.M.

Anggota Komisi IV DPR RI



Andi Akmal Dorong Pemerintah Perhatikan Nasib Nelayan dengan Dukungan Infrastruktur

Saya mendorong Pemerintah merubah nelayan kecil kita menjadi besar secara merata di Indonesia. Perimbangan perbandingan jumlah nelayan kecil dan nelayan besar yang sangat timpang mesti di geser

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Kabupaten Bone (20/08) — Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mengatakan, hingga saat ini penguasaan kapal 30 GT (Gross Tonnage) hanya dimiliki segelintir pelaku usaha perikanan.

Menurut pria yang akrab disapa Akmal ini, sekitar 95% kapal berbendera Indonesia yang bekerja mencari ikan di laut dalam usaha perikanan tangkap hanya berkekuatan tidak sampai 30 GT.

Pemerintah menurut Akmal, selama ini berfokus pada pembinaan nelayan kecil yang di mayoritas bekerja dengan kapal berkekuatan 5 GT.

kmal memahami memang pada kenyataannya, hingga saat ini mayoritas nelayan kita nela-

yan kecil. Organisasi kelompok-kelompok nelayan dengan manajemen kelompok sangat minim yang mampu berkolaborasi mengelola kapal besar.

"Dominasi kapal berukuran kecil lima Gross Tonnage kebawah masih membayangi nelayan kita. Sehingga fokus pembangunan dan bantuan nelayan kecil cenderung lebih besar kepada kapal kecil. Termasuk pembinaan nelayannya juga masih skala kecil. Ini yang membuat industri perikanan dalam negeri kita tertinggal dari negara lain meskipun potensi alam laut negara kita sangat kaya", jelas Akmal.

Politisi PKS ini melanjutkan, saat ini ikan-ikan kita di pinggiriran sudah mulai sulit di dapat. Harus melaju

semakin ke tengah samudera untuk mendapat ikan. Bila kondisi nelayan tidak dibekali infrastruktur alat penangkap ikan yang memadai, ikan-ikan yang menjadi hak negara kita dikuras oleh negara lain yang memiliki kapal yang lebih memadai dan canggih.

Peraturan perundangan yang ada saat ini, menurut akmal, menuntut nelayan-nelayan kita berskala menengah untuk bersaing dengan negara luar dan bersaing dengan alam yang sudah mulai sulit menyediakan ikan di dekat daratan.

"Pemerintah kedepannya harus mulai intensif dalam pembinaan masyarakat nelayan menuju nelayan berskala menengah. Mulai dari pendampingan SDM, kemudahan dalam permodalan misal KUR untuk nelayan, hingga produksi kapal skala minimal 30 GT" Saran Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan, bahwa Pemikiran Pemerintah saat ini selalu beranggapan nelayan kita tidak sanggup mengoperasikan kapal besar sehingga bila disediakan kapalnya akan menjadi



mubadzir.

Cara berpikir seperti itu mesti segera dihilangkan dengan langkah-langkah, diantaranya, melatih nelayan-nelayan kita, membina, mendampingi mereka, baik secara skill maupun organisasinya. "Manajemen pengelolaan, SDM, teknik operasi alat sampai manajemen keuangan harus di latih sampai siap," tegas Akmal.

Akmal melanjutkan, bila Pemerintah menunggu saja sampai nelayan-nelayan kita siap, maka tidak akan siap

terus tanpa ada pembinaan. Negara kita sangat mampu memproduksi kapal besar, tinggal pemerataan skill SDM nelayan dalam mengoperasikannya.

Politisi PKS ini mengatakan, dari sisi memproduksi kapal, Indonesia sangat mampu membuatnya. Bahkan kemampuan PT PAL Indonesia sangat berkompeten dalam sinergi produksi kapal-kapal seperti ini dalam jumlah masal.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Anggota Fraksi PKS Prihatin Dengan Kondisi Petani Jeruk di Gunung Omeh.

Campur tangan pemerintah untuk menstabilkan harga akan memberi semangat petani untuk menanam yang dalam jangka panjang akan menekan angka impor produk pangan secara keseluruhan

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Padang (22/08) — Anggota DPR RI komisi VI, Nevi Zuairina ketika berkunjung di kebun jeruk Gunung Omeh, 50 Kota, Sumatera Barat, menemukan fenomena keluhan petani buah-buahan terutama jeruk yang menghadapi ketidak stabilan harga.

Menurut Nevi, sejumlah petani pada saat panen, mengeluhkan harga jeruk yang jatuh hingga pada titik dibawah biaya produksi sehingga mengancam kerugian besar.

Sedangkan ketika tidak musim panen, harga sangat tinggi sehingga membuat resah para konsumen yang akan membeli produk buah untuk dikon-

sumsi secara rumah tangga.

"Hingga saat ini belum ada jalan keluar untuk masalah harga buah ini. Terutama Jeruk di Gunung Omeh ketika panen melimpah sampai harga murah sekali. Meski ada koperasi yang berinisiatif membantu menstabilkan harga, tetapi tidak cukup kuat sehingga tidak signifikan untuk menemukan solusi dikalangan petani", tutur Nevi Zuairina.

Politisi PKS ini mengatakannya, pelaku pasca panen di daerah Gunung Omeh atau dalam bahasa Indonesia diartikan Gunung Emas, sebuah kecamatan yang berada di kabupaten Iimapoluh kota, Sumatera

Barat, mayoritas adalah industri skala rumah tangga.

"Dalam dunia usaha masuk pada kategori skala mikro atau kecil. Pendampingan dan Bantuan pemerintah saat ini, belum signifikan mengentaskan para petani jeruk sebagai pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan kesejahteraan-nya," ungkap Nevi.

Nevi melanjutkan, Kecamatan Gunung Omeh yang terkenal sebagai penghasil jeruk siam gunung omeh (biasa disebut jesigo) seharusnya dapat menjadi sebuah kearifan lokal yang dapat dikembangkan sehingga menjadi salah satu icon Indonesia dalam memproduksi produk hortikultura pada kategori buah jeruk.

"Kecamatan Gunung Omeh memiliki luas wilayah 156,54 km² dan terletak pada ketinggian 700-1100 mdpl ketika dikembangkan menjadi agrowisata yang baik, akan berpotensi menarik wisatawan untuk mencicipi produk buahnya sekaligus menikmati keindahan alamnya," paparnya.



Bahkan, imbuhan Nevi, untuk Eduwisata bagi anak-anak sekolah, belajar bagaimana bercocok tanam jeruk hingga bagaimana mengolah sirup jeruk sendiri menjadi daya tarik yang baik untuk pendidikan.

"Pada tahun 2017 saja, produksi jeruk dari kecamatan Gunung Omeh ini telah mencapai 24.600 ton. Dengan dukungan peternakan di antaranya sapi, kambing, kerbau, ayam kampung, dan itik, juga dapat dikembangkan saling bersinergi untuk mensuplai pupuk organiknya. Sehingga ada integrasi pertanian dan peternakan yang dapat membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraannya", jelas Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat ini meminta kepada Pemerintah pusat, agar semakin intensif bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengendalikan proses pasca

panen produk hortikultura ini terutama jeruk. Stabilisasi harga akan terjadi manakala ada serapan signifikan pada saat panen. Serapan akan signifikan ketika industri pasca panen sudah baik yang berada pada lokasi produksi.

"Saya kira permasalahan petani di setiap daerah hampir sama ketika menghadapi masa panen. Jeruk di Gunung Omeh ini hanya salah satu contoh. Bahkan pekan lalu saya mendengar ada petani tomat di probolinggo menghadapi panen tomat dengan harga 500 rupiah per kilogram. Ini kan kasian petani, sudah susah menanam akhirnya rugi. Campur tangan pemerintah untuk menstabilkan harga akan memberi semangat petani untuk menanam yang dalam jangka panjang akan menekan angka impor produk pangan secara keseluruhan", tutup Nevi Zuairina.

“Kita berharap tidak ada siswa siswi yang putus sekolah baik dari tingkat SD, SMP dan SMA di Sulawesi Tengah” Program Indonesia Pintar ini harus tepat sasaran penggunaannya, PIP ini harus tepat guna dan tepat sasaran, dan hari ini saya melihat mereka-mereka ini lah yang tepat guna tepat sasaran

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Komisi X DPR RI

Palu (28/08) – Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri, melakukan sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa yang mendapatkan beasiswa PIP.

Sakinah menggelar sosialisasi pencairan Program Indonesia Pintar (PIP), kepada pelajar dari sejumlah SD, SMP

Sosialisasi Pencairan Program Indonesia Pintar

Sakinah Harap Tak Ada Lagi Siswa Putus Sekolah

dan SMA di Sulawesi Tengah yang dilakukan di aula SMAS Alkhairaat 1 Palu, Selasa (26/08/2020).

Beasiswa PIP yang merupakan program Pemerintah ini penyelurannya ada dua cara, pertama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke penerima melalui sekolah-sekolah, dan kedua melalui pemangku kepentingan yaitu berupa aspirasi anggota DPR RI Komisi X.

Sakinah berharap dengan Program Indonesia Pintar tidak ada lagi siswa yang putus sekolah.

“Kita berharap tidak ada siswa siswi yang putus sekolah baik dari tingkat SD, SMP dan SMA di Sulawesi Tengah,” jelasnya.

Cucu pendiri lembaga pendidikan Islam Alkhairaat, Habib Sayyid Idrus Bin Salim menyampaikan bahwa program PIP harus tepat sasaran.

“Program Indonesia Pintar ini harus tepat sasaran penggunaannya, PIP ini harus tepat guna dan tepat sasaran,

dan hari ini saya melihat mereka-mereka ini lah yang tepat guna tepat sasaran,” ungkap Sakinah.

Kondisi literasi siswa Indonesia rendah, sehingga ini merupakan motivasi bersama untuk kita dongkrak.

“Indonesia tertinggal tingkat literasi bacaranya, sehingga kita mau mendongkrak minat baca siswa dengan beasiswa PIP ini,” kata Sakinah.

Program beasiswa PIP ini akan tetap berlanjut terus,” Insyah Allah setiap tahun akan kita kukurkan kita advokasi terus, dengan cemikan setiap tahun insya Allah penerima beasiswa akan terus bertambah,” pungkas Sakinah.

Turut hadir dalam sosialisasi ini kepala sekolah dan atau perwakilan guru dari SD Alkhairaat 1 Palu, SD Alkhairaat 2 Palu, SMP Alkhairaat 1 Palu, SMP Alkhairaat 2 Palu, SMAN 1 Palu, SMAN 2 Palu, SMAN 4 Palu, SMAS Alkhairaat 1 Palu, SMKS Kelas Jauh di Ponpes Putri Alkhairaat Palu.



Tinjau Kebakaran Gudang Kayu, Rofik Berikan Bantuan

"Kami mengucapkan turut berbelasungkawa dengan musibah kebakaran yang terjadi, semoga musibah ini tidak mengurangi semangat Bapak Sofiyon dan keluarga. Selain itu kami juga membawa sedikit bantuan uang tunai, untuk mengurangi dampak dari musibah kebakaran yang terjadi

H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI

Purbalingga (21/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto, meninjau lokasi kebakaran Gudang Kayu di Desa Desa Toyareja RT.03/RW 03, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Kamis (20/08/2020).

Rofik dan Fidloh Threeyati (Istri) melihat langsung gudang yang terbakar pada Selasa, (18/08/2020) lalu, sekitar pukul 18.00 WIB.

Diketahui gudang yang terbakar merupakan ruang penyimpanan kayu milik UD Putra Bangkit (Pabrik kayu)

milik Sofian Wahyudi, laki-laki berusia 45 tahun.

Kebakaran tersebut terjadi diduga berasal dari ruang oven, dalam proses pemadaman, warga setempat dibantu oleh 20 personil dengan 3 unit mobil pemadam kebakaran yang dibantu 3 unit mobil tangki BPBD beserta 10 personil, menghabiskan 28 tanki air, dan berhasil dipadamkan 5 jam kemudian, dan tidak ada korban jiwa.

Dalam kunjungannya, Rofik menyampaikan keprihatinannya serta

memberikan bantuan uang tunai senilai Rp. 5 juta.

"Kami mengucapkan turut berbelasungkawa dengan musibah kebakaran yang terjadi, semoga musibah ini tidak mengurangi semangat Bapak Sofiyon dan keluarga." Kata Rofik

"Selain itu kami juga membawa sedikit bantuan uang tunai, untuk mengurangi dampak dari musibah kebakaran yang terjadi." Tambahnya

Korban kebakaran mengucapkan terimakasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan.

"Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Rofik dan Bu Fidloh yang sudah menyempatkan silaturahmi ke tempat kami serta memberikan bantuan, sebuah kebanggaan bagi kami. Bantuan ini sangat bermanfaat." Tutur Muchali mewakili pihak keluarga.



PKS DKI Gelar Acara Dzikir

Anis: Upaya Tepat Raih Ketenangan Jiwa di tengah Pandemi

Kita berharap Allah meneguhkan kita menjadi pribadi yang baru, lebih tunduk dan lebih taat kepada-Nya, pribadi yang sabar dan kuat melewati ujian dan musibah yang Allah berikan, pribadi yang senantiasa melakukan dzikir dalam seluruh aktivitas dan karya kita,”

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (28/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, memberikan apresiasi kepada Bidang Pembinaan Ummat (BPU) dan Bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS) DPW PKS DKI Jakarta, yang menggelar acara Tahliil, Dzikir dan Ngaji Kitab online melalui PKS TV DKI dan FB PKS DKI Jakarta setiap Kamis malam.

“Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan memberikan dampak ke

semua lini kehidupan manusia, semoga acara ini, menjadi wadah masyarakat Indonesia untuk berhenti sejenak dari hiruk pikuk dunia, mendekatkan diri kepada Allah SWT untuk meraih ketenangan dan rahmatNya, sebagaimana kabar bahagia yang disampaikan Rasulullah SAW dalam salah satu haditsnya,” papar politisi senior PKS ini dalam acara yang dihadiri online oleh KH Yusup Tajri, KH Mahmud Mahfudz dan

para peserta dari berbagai wilayah Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Anis menyampaikan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut, ‘Dan tidaklah sekelompok orang berkumpul di dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca Kitab Allah dan saling belajar diantara mereka, kecuali ketenangan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan (para malaikat) di hadapanNya [HR Muslim, no. 2699; Abu Dawud, no. 3643; Tirmidzi, no. 2646; Ibnu Majah, no. 225; dan lainnya].’

“Kebiasaan salafunaa shoohiin, berkumpul karena Allah SWT meski dengan online, melantunkan tahliil dengan hati yang bersih dan khushyuk, berdzikir kepadaNya yang dilanjutkan dengan mengkaji kitab, semoga tercatat sebagai pemberat timbangan kebaikan



mita semua di yaumul hisab,” imbuhnya.

Anggota Komisi XI ini berharap semoga Allah segera menghilangkan virus covid-19 dari muka bumi.

“Kita berharap Allah meneguhkan kita menjadi pribadi yang baru, lebih tunduk

dan lebih taat kepada-Nya, pribadi yang sabar dan kuat melewati ujian dan musibah yang Allah berikan, pribadi yang senantiasa melakukan dzikir dalam seluruh aktivitas dan karya kita,” pungkasnya.

Hermanto Serahkan Unit Pengolahan Pupuk Organik kepada Petani Dharmasraya

Penerima program UPPO, jelasnya, ditargetkan menjadi produsen pupuk organik yang bahan baku utamanya adalah kotoran sapi. Pupuk organik yang dihasilkan nanti, hendaknya dipakai sendiri untuk meningkatkan kesuburan tanah masing-masing anggota kelompok.

Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Padang (24/08) — Anggota DPR RI Dapil Sumbang I Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan berkesempatan mengunjungi kelompok tani Kenari di Jorong Koto Gadang Kiri, Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya.

Dalam kunjungan tersebut diserahkan satu paket UPPO (Unit Pengolahan Pupuk Organik) yang terdiri dari instalasi pengolahan pupuk organik, kendaraan roda tiga, mesin pencacah, bangunan

kandang ternak dan 8 ekor sapi total senilai 200 juta rupiah.

"Diingatkan, dana Program UPPO ini berasal dari negara. Ini berarti, kelompok Kenari dipercaya untuk menjalankan tugas negara. Jalankan tugas ini sebaik-baiknya", ujar Hermanto dalam temu kelompok sebelum penyerahan bantuan.

Penerima program UPPO, jelasnya, ditargetkan menjadi produsen pupuk organik yang bahan baku utamanya adalah kotoran sapi.

"Pupuk organik yang

dihasilkan nanti, hendaknya dipakai sendiri untuk meningkatkan kesuburan tanah masing-masing anggota kelompok", ucap legislator dari FPKS ini.

Hermanto menyarankan, pupuk organik tersebut untuk tahap awal agar digunakan untuk tanah yang ditanami tanaman yang berumur pendek seperti sayuran: kangkung, bayam, mentimun, kacang panjang dan yang semacamnya.

"Jadi dengan merawat sapi, beberapa bulan kemudian bisa mendapat penghasilan dari menjual kangkung, bayam dan jenis sayuran lainnya", tuturnya.

Dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan terus bertambahnya pupuk organik yang dihasilkan, menurut Hermanto, pupuk bisa digunakan untuk tanaman lain atau dijual.

"Jadi kedepannya, dengan mengolah pupuk organik petani akan mendapat penghasilan ganda, yaitu dari hasil panen tanaman berumur pendek dan tanaman berumur panjang



serta menjual pupuk', paparnya.

Selain itu, lanjutnya, petani juga akan mendapat tambahan penghasilan dari anak-anak sapi yang lahir dari 8 ekor sapi induk tersebut.

"Anak-anak sapi itu bisa dijual sebagai tambahan penghasilan bagi yang merawatnya", jelasnya.

"Kalau kelompok ini

kompak, semangat, disiplin dan sabar maka saya yakin program UPPO ini akan bisa mensejahterakan semua anggotanya", pungkas legislator Anggota Komisi IV DPR ini.

Hadir mendampingi Hermanto dalam kegiatan ini anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya Irmon serta 2 tokoh muda setempat Suparto dan Sarwadiyanto.

Terkait Kasus Pemerasan 64 Kepsok di Inhu

Habib Aboe Minta Penegak Hukum Bersinergi

Saya meminta ada koordinasi yang baik antara Kejagung dengan KPK. Pada kasus tersebut sebenarnya KPK sudah mulai melakukan pemeriksaan terhadap 83 Kepala SMP se-Indragiri Hulu

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (23/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsy menyoroiti kasus dugaan pemerasan yang dilakukan seorang Jaksa terhadap 64 Kepala Sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.

Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe ini, apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung di Inhu sudah tepat.

"Saya mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh KPK dan Kejagung di Inhu. Adanya pemerasan terhadap 64 Kepala Sekolah memang seharusnya cepat ditangani," tegasnya.

Hal ini sangat penting, lanjut Habib Aboe, jangan

sampai ada aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki.

"Saya meminta ada koordinasi yang baik antara Kejagung dengan KPK. Pada kasus tersebut sebenarnya KPK sudah mulai melakukan pemeriksaan terhadap 83 Kepala SMP se-Indragiri Hulu," urai Anggota Komisi III DPR RI ini.

Akan tetapi, katanya, proses penyelidikan yang dilakukan KPK, kalah cepat dengan langkah Kejagung yang langsung menetapkan tersangka.

"Akibatnya saya mendengar ada salah satu komisioner yang kemudian bersuara, mereka merasa

dilangkahi," tuturnya.

"Saya berharap tidak ada sengketa kewenangan di sini, jangan sampai juga ada ego sektoral. Semua pihak harus fokus pada target utama yaitu pemberantasan korupsi. Kita tidak boleh kehilangan fokus karena silang pendapat terkait kewenangan penyidikannya," imbuh Bendahara Fraksi PKS DPR RI ini.

Habib Aboe

menambahkan, ada dua alternative pilihan yang bisa dilakukan untuk melanjutkan penyidikan ini.

"Pertama, penyidikan sepenuhnya diserahkan KPK, karena mereka yang lebih dulu melakukan pemeriksaan. Atau, alternative kedua, perkara ini dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung karena mereka telah menetapkan tersangka. Pada posisi ini saya kira KPK masih bisa menjalankan fungsi supervisinya," tutup Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ini.





الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا

إنا لله وإنا إليه راجعون



Keluarga besar Fraksi PKS DPR RI
Turut berduka atas berpulangnya ke rahmatullah
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI

Hj. Umi Kulsum

Wafat Pada Sabtu 29 Agustus 2020
pukul 20.40 WIB di RS Persahabatan Jakarta

Semoga Allah SWT menerima amal
ibadahnya serta Mengampuni
segala Dosanya Amin



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Jelang Pilkada 2020, Netty Gerakkan Kader Perempuan PKS Indramayu

Melihat perkembangan terkini, tampaknya pilkada akan diselenggarakan dalam situasi masih diliputi pandemi Covid-19. Apa boleh buat, PKS harus siap menyambut pesta demokrasi ini dengan terus menggerakkan mesin partai yang salah satu elemennya adalah kader perempuan

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Indramayu (24/08) — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak kian dekat. 270 daerah bersiap menyelenggarakannya Desember 2020, salah satunya kabupaten Indramayu.

Netty Prasetyani Aher, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI menggerakkan kader perempuan PKS agar siap berkontribusi memenangkan paslon yang diusung atau didukung PKS.

"Melihat perkembangan terkini, tampaknya pilkada akan

diselenggarakan dalam situasi masih diliputi pandemi Covid-19. Apa boleh buat, PKS harus siap menyambut pesta demokrasi ini dengan terus menggerakkan mesin partai yang salah satu elemennya adalah kader perempuan," ungkapnya dalam Workshop Optimalisasi Peran Kontributif Kader Perempuan PKS di Islamic Center Indramayu.

Workshop diselenggarakan selain untuk membahas

persiapan pemenang pilkada juga untuk memberikan penguatan kapasitas dan kompetensi kader perempuan PKS.

"Perempuan PKS dituntut mengoptimalkan peran kontributifnya di tengah masyarakat agar keberadaannya menjadi solusi atas persoalan-persoalan sosial. Apalagi! kader perempuan PKS banyak bersinggungan langsung dengan masyarakat, membina dan mendampingi serta menangani berbagai permasalahannya. Oleh sebab itu, potensinya harus terus diasah dan ditingkatkan," tambah legislator PKS dari DPRD Cirebon - Indramayu.

Jelang pilkada ini, PKS Indramayu yang memiliki dua kursi wakil rakyat di DPRD, masih belum menentukan kemana perahu akan berlabuh memberikan dukungan paslon.

Netty Aher mengatakan PKS harus berpihak pada rakyat dengan memilih paslon yang siap membangun Indramayu, mencerdaskan masyarakat dan



membebaskannya dari jerat kemiskinan dan angka IPM yang rendah.

"Jangan sampai terjadi pembiaran kebobrohan dan kemiskinan rakyat Indramayu," ujar Netty.

Ketua DPD PKS Indramayu, Tauhid menambahkan berdasarkan perhitungan jumlah kursi, kesempatan PKS adalah berkoalisi dengan partai lain.

"Kami siap membuka komunikasi politik dengan semua pihak yang memiliki tujuan sama. PKS Indramayu juga memiliki banyak kader yang berkualitas dan siap memimpin, baik laki-laki maupun perempuan," terangnya.

Menurut Tauhid, sebagai

partai politik modern, partisipasi perempuan menjadi salah satu indikator penting.

"Dengan konsolidasi ini, kader perempuan PKS diharapkan terus terlibat dalam penyelesaian masalah sosial seperti tingkat Pendidikan masyarakat, tingkat perceraian yang tinggi, jerat rentenir atau bank keliling, fenomena anak jalanan serta persoalan pengasuhan anak pekerja migran," katanya.

Sebagai penutup, Netty mengatakan bahwa peran kontributif kader perempuan PKS akan membuat masyarakat terdidik, melekat politik, dan mau bergerak melakukan perubahan untuk kemajuan Indramayu.

Bersama Bupati Karawang, Syaikhul Serahkan Alsintan pada Warga Desa Mekar Asih

Bantuan alsintan ini wujud kepedulian saya terhadap para petani. Saya berharap ini akan dapat meningkatkan produktivitas hasil tani.

H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar V

Kabupaten Karawang (27/08) – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhul menyerahkan bantuan alat-alat mesin pertanian (alsintan) kepada masyarakat di Desa Mekar Asih, Kecamatan Banyusari, Karawang, Rabu, (26/8).

Dalam acara itu, Syaikhul didampingi oleh Bupati Karawang Celica Nurachdiana, Kepala Dinas, Camat Banyusari, 12 Kepala Desa dan aparaturnya pemerintah serta tokoh masyarakat setempat.

Menurut Syaikhul, bantuan alsintan ini wujud kepedulian terhadap masyarakat Karawang. Politisi PKS itu berharap alsintan akan bermanfaat optimal untuk

meningkatkan produktivitas para petani.

"Ini wujud kepedulian saya terhadap para petani. Saya berharap ini akan dapat meningkatkan produktivitas hasil tani," ujar Syaikhul.

Anggota Komisi V DPR itu mengingatkan soal keberadaan Karawang sebagai lumbung padi nasional. Status ini harus dipertahankan dengan cara merawat dan menjaga serta memaksimalkan alsintan yang diberikan.

"Keberadaan Karawang sebagai lumbung padi nasional harus dipertahankan. Karena itu alsintan yang ada perlu dijaga bersama," kata Syaikhul.

Sementara itu, Bupati

Karawang mengucapkan terimakasih atas bantuan alsintan yang merupakan perjuangan dari Ahmad Syaikhul.

"Ustadz Syaikhul orang baik. Beliau guru dan orang tua saya. Banyak perhatian kepada masyarakat Karawang, termasuk bantu alsintan ini. Terima kasih Pak Ustadz," ungkap Celica.

Alsintan diberikan kepada lima kelompok tani yang ada di Kecamatan Banyusari. Alsintan terdiri dari Hansprayer 5 Unit, Traktor R2 2 Unit dan pompa air 13 unit.

Syaikhul berkomitmen untuk kembali memberikan bantuan alsintan agar petani Karawang sejahtera.

"Insha Allah akan saya perjuangkan. Mohon doanya," pungkask Syaikhul



Menjawab Tantangan 75 Tahun
Indonesia Merdeka

Fraksi PKS Ajak Generasi Bangsa Gaungkan Semangat Proklamasi

Perlombaan ini sekali lagi merupakan tradisi Fraksi PKS dalam mengkokohkan semangat generasi bangsa untuk menjaga NKRI dengan tidak melupakan sejarah kemerdekaan Indonesia yang Proklamasinya dibacakan oleh Bung Karno. Ini adalah ajang untuk menggaungkan kembali semangat Proklamasi 17 Agustus 1945.

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI





Menjawab Tantangan 75 Tahun Indonesia Merdeka

Fraksi PKS Ajak Generasi Bangsa Gaungkan Semangat Proklamasi



Jakarta (27/8) - Fraksi PKS DPR RI mengumumkan pemenang Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Bung Karno pada hari ini tanggal 27 Agustus 2020. Acara yang dirilis melalui sosial media Fraksi PKS ini terselenggara secara meriah di mana ditampilkan video peserta dengan berbagai latar dan kreasi sehingga pembacaan teks proklamasi tampak hidup.

Acara dikemas dengan Webinar mengangkat tema "Menjawab Tantangan 75 Tahun Indonesia Merdeka dengan menghadirkan narasumber Dr H. M. Hidayat Nur Wahid, MA (Wakil Ketua MPR RI), Prof. Dr Siti Zuhro, MA (Peneliti Senior LIPI), dan Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, MH (Kepala BNPT/Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam sambutan acara mengatakan bahwa perlombaan ini sekali lagi merupakan tradisi Fraksi PKS dalam mengokohkan semangat generasi bangsa untuk menjaga NKRI dengan tidak melupakan sejarah kemerdekaan Indonesia yang Proklamasinya dibacakan oleh Bung Karno. Ini adalah ajang untuk menggaungkan kembali semangat Proklamasi 17 Agustus 1945.

Sementara itu Profesor Siti Zuhro dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafly sama-sama mengapresiasi inisiatif Fraksi PKS dan berharap PKS terus menjadi bagian yang merekat persatuan bangsa karena tantangan 75 tahun Indonesia merdeka butuh usaha kolektif baik dalam menangkap peluang maupun dalam menghadapi ancaman dalam berbagai bentuknya.

Pemenang lomba yang diminta komentar dan testimoni merasa bangga ikut

berpartisipasi dalam lomba dan mengapresiasi inisiatif Fraksi PKS dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme dengan perlombaan yang menggugah. Mereka merasa memiliki saluran untuk tetap berkarya meski di masa pandemi saat ini. Bravo PKS!

Perlombaan ini sekali lagi merupakan tradisi Fraksi PKS dalam mengokohkan semangat generasi bangsa untuk menjaga NKRI dengan tidak melupakan sejarah kemerdekaan Indonesia yang Proklamasinya dibacakan oleh Bung Karno. Ini adalah ajang untuk menggaungkan kembali semangat Proklamasi 17 Agustus 1945.

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI





Persembahkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dalam Rangka Menyambut HUT Kemerdekaan RI Ke-75

SELAMAT

Kepada Pemenang Lomba Baca Teks Proklamasi
mirip suara Bung Karno Tahun 2020

- **Juara 1** Berhak atas hadiah
Sebesar Rp 5.000.000,-
- **Juara 2** Berhak atas hadiah
Sebesar Rp 3.500.000,-
- **Juara 3** Berhak atas hadiah
Sebesar Rp 2.000.000,-
- **Juara Harapan 1** Berhak atas
hadiah Sebesar Rp 1.000.000,-
- **Juara Harapan 2** Berhak atas
hadiah Sebesar Rp 500.000,-

Suryana Hasan

Bogor, Jawa Barat
Instruktur B. Inggris & penulis buku

Aman Nurohman

DKI Jakarta
Guru

Richard Fransiscus Elfin Hulu

Nias, Sumatera Utara
Mahasiswa

Tyas Akbar Gumilar

Bantul, DIY
Guru

Md. Navri Zulirfan

Siak, Riau
Mahasiswa



INDONESIA
MAJU

**DIRGAHAYU
REPUBLIK
INDONESIA**

17 Agustus 2020





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Selamat
TAHUN BARU ISLAM
1442 H
1 MUHARRAM 1442 H

Bukhori: Momentum Muharram di tengah Pandemi, Momentum Kegagalan Oligarki

“Di saat arah politik bangsa menuju kepada kekuasaan oligarki, justru Allah timpakan pandemi yang membuat semua rekayasa dan rencana manusia menjadi tidak seberapa jika dibandingkan dengan rencana dan kemampuan Allah.”

KH. Bukhori, Lc., M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI

Ada banyak laporan di daerah ke struktur PKS betapa anak-anak kita pelajar dan teman-teman mahasiswa membutuhkan dukungan kuota bahkan gawai untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh

H. MUSTAFA KAMAL, S.S.

Sekjen PKS

PKS Luncurkan Gerakan Nasional Berbagi Kuota Internet Gratis Pelajar dan Mahasiswa

Bantuan kuota internet ini adalah bagian dari layanan PKS sejak masa Pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia.

"Ada banyak laporan di daerah ke struktur PKS betapa anak-anak kita pelajar dan teman-teman mahasiswa membutuhkan dukungan kuota bahkan gawai untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Di satu sisi pelajar dan mahasiswa masih membayar SPP tapi ada kebutuhan tambahan untuk beli kuota dan bahkan gawai," kata Mustafa dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (23/08/2020).

Mustafa menjelaskan nantinya kantor-kantor struktur PKS, Rumah Aspirasi, Kantor Aspirasi Anggota DPR/DPD dari PKS dan Rumah-rumah kader untuk dijadikan spot WiFi gratis dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19.

"Termasuk nanti bantuan dalam bentuk kuota untuk teman-teman pelajar dan mahasiswa yang tidak mampu. Kita juga bisa siapkan gawai untuk dipakai secara bergantian atau pemberian

gawai bagi yang benar-benar membutuhkan," ujar Mustafa.

Mustafa meminta kepada Pemerintah untuk benar-benar memikirkan jaring pengaman juga untuk pelajar dan mahasiswa yang tidak mampu. Ia menyebut betapa mirisnya saat mendengar berbagai kabar anak-anak harus bekerja mencari uang demi membeli kuota internet untuk belajar.

"Kita sedih, prihatin bahkan sampai ada orang tua yang terpaksa melakukan tindak pidana demi mendapatkan gawai dan kuota bagi sang anak sekolah jarak jauh. Ini bukan berita biasa, ini ironi sebagai bangsa. Pemerintah harus memberikan insentif kuota internet gratis bagi pelajar dan mahasiswa tidak mampu," kata Mustafa menjelaskan.

Jakarta (24/08) — DPP PKS akan meluncurkan Gerakan Nasional Berbagi Kuota Internet/WiFi Gratis (GEREGET) untuk pelajar dan mahasiswa.

Sekretaris Jenderal DPP PKS Mustafa Kamal menyebutkan sejatinya gerakan bagi-bagi kuota internet gratis untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) sudah dilakukan Anggota DPRD asal PKS dan struktur PKS di daerah.

Mustafa mengatakan, gerakan ini diadopsi sebagai gerakan nasional untuk memberikan manfaat besar bagi pelajar dan mahasiswa yang sangat membutuhkan dalam PJJ.





Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

**KANAL RESMI
FRAKSI PKS
DPR RI**

fraksi.pks.id



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI